

BUKU II

RENCANA INDUK SMART CITY KABUPATEN ACEH SELATAN



KABUPATEN ACEH SELATAN, 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Master Plan Smart City	2
1.3 Landasan Hukum.....	2
1.4 Kerangka Pikir Smart City	3
II. VISI <i>SMART CITY</i> KABUPATEN ACEH SELATAN.....	6
2.1 Visi <i>Smart City</i> Kabupaten Aceh Selatan.....	6
2.2 Misi Smart City Kabupaten Aceh Selatan.....	6
2.3 Sasaran Dan Tujuan Smart City Kabupaten Aceh Selatan.....	8
2.4 Hubungan Misi Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan dan Dimensi Smart City .	21
III. STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY.....	21
3.1 Smart Governance	21
3.2 Smart Branding.....	31
3.3 Smart Economy	40
3.4 Smart Living.....	50
3.5 Smart Society	56
3.6 Smart Environment.....	64
IV. RENCANA AKSI SMART CITY	73
4.1 Pengembangan Kebijakan Dan Kelembagaan Smart City Kabupaten Aceh Selatan	75
4.1.1 Kebijakan.....	75
4.1.2 Kelembagaan	81
4.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City	87
4.3 Rencana Pengembangan Aplikasi Dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City ...	88
4.4 Sinkronisasi Program RPJMD Dengan Program Kerja Inovasi Smart City	93
4.4.1 Smart Governance	93
4.4.2 Smart Branding.....	95
4.4.3 Smart Economy	97
4.4.4 Smart Living.....	101
4.4.5 Smart Society.....	102

4.4.6	Smart Environment.....	112
V.	Peta Jalan Pembangunan Smart City	115
5.1	Fase Program Jangka Pendek (Tahun 2021-2022).....	115
5.2	Fase Program Jangka Menengah (2021-2026).....	117
5.3	Fase Program Jangka Panjang (2021-2031).....	121
5.4	Quick Win	124
VI.	PENUTUP	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Landasan Hukum Smart City Kabupaten Aceh Selatan.....	2
Tabel 2.1 Misi Smart City Kabupaten Aceh Selatan.....	7
Tabel 2.2 Sasaran dan Tujuan Smart City Kabupaten Aceh Selatan.....	8
Tabel 2.3 Hubungan Misi Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan dan Dimensi Smart City	21
Tabel 3.1 Analisis SWOT Dimensi Smart Governance	22
Tabel 3.2 Strategi Pembangunan Smart Governance	30
Tabel 3.3 Analisis SWOT Dimensi Smart Branding.....	31
Tabel 3.4 Strategi Pembangunan Smart Branding.....	38
Tabel 3.5 Analisis SWOT Dimensi Smart Economy	40
Tabel 3.6 Strategi Pembangunan Smart Economy	47
Tabel 3.7 Analisis SWOT Dimensi Smart Living.....	50
Tabel 3.8 Strategi Pembangunan Smart Living.....	55
Tabel 3.9 Analisis SWOT Dimensi Smart Society.....	56
Tabel 3.10 Strategi Pembangunan Smart Society	63
Tabel 3.11 Analisis SWOT Dimensi Smart Environment.....	64
Tabel 3.12 Strategi Pembangunan Smart Environment.....	71
Tabel 4.1 Rencana Aksi Pengembangan Kebijakan Smart City Kabupaten Aceh Selatan	75
Tabel 4.2 Rencana Aksi Pengembangan Kelembagaan Smart City Kabupaten Aceh Selatan	82
Tabel 4.3 Infrastruktur Pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	88
Tabel 4.4 Rencana Aksi Pengembangan Aplikasi Pendukung.....	90
Tabel 4.5 Layanan Aplikasi Yang Digunakan pada OPD Kabupaten Aceh Selatan	91
Tabel 4.7 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Governance	93
Tabel 4.8 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Branding ...	95
Tabel 4.9 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Economy ...	97
Tabel 4.10 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Living ...	101
Tabel 4.11 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Society ..	102
Tabel 4.12 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Environment	112
Tabel 5.1 Fase Program Jangka Pendek (Tahun 2021-2022).....	115
Tabel 5.2 Fase Program Jangka Menengah (Tahun 2021-2025).....	118
Tabel 5.3 Fase Program Jangka Panjang (Tahun 2021-2031).....	122
Tabel 5.4 Kegiatan Quick Win Kabupaten Aceh Selatan	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dimensi Smart City	4
-----------------------------------	---

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berbasis Kota Pintar (*Smart City*) saat ini menjadi sebuah trademark di seluruh dunia, begitu juga bagi pembangunan kota atau kabupaten di Indonesia. Pembangunan kota berbasis solusi *Smart City* juga dijadikan sebagai salah satu visi misi dan program kerja pada berbagai kota di Indonesia dan didokumentasikan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada setiap kota di Indonesia.

Kota Pintar ini juga diinisiasi oleh Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PANRB. Kementerian Kominfo juga telah mencanangkan Gerakan Menuju 100 *Smart City* dimana Kabupaten Aceh Selatan juga terdorong untuk melakukan akselerasi pembangunan dengan menggunakan konsep *Smart City* atau Kota Pintar. Dengan adanya pembangunan berbasis *Smart City*, maka terbukanya ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dengan memanfaatkan teknologi dan pembangunan dengan pendekatan smart city sebagai *enabling* faktor.

Fenomena kota pintar juga tidak serta merta mengubah identitas sebuah Kota/Kabupaten yang telah terbentuk ratusan tahun sebelumnya. Aceh Selatan dikenal sebagai wilayah pertanian, perkebunan dan sedang berkembang menjadi daerah wisata. Pembangunan berbasis smart city yang dilakukan dengan pendekatan enam dimensi sangat berpeluang untuk meningkatkan nilai dan mutu pembangunan kabupaten Aceh Selatan dengan meningkatkan kemitraan antara stakeholder baik dari unsur pemerintah, pengusaha, akademik, industri, kelompok budaya dan pelaku usaha keratif. Melalui penyusunan rencana induk ini diharapkan mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan pembangunan daerah berbasis konsep smart city dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal dan landasan syariah islam. Rencana induk *smart city* ini akan melakukan pemetaan terhadap potensi dan permasalahan, kesiapan infrastruktur, serta SDM yang dimiliki, sehingga

berkesinambungan dalam menjaga keseimbangan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan Aceh Selatan dalam mengimplementasikan konsep pembangunan smart city.

1.2 Tujuan Master Plan Smart City

Adapun tujuan dari penyusunan *masterplan* ini adalah untuk menyusun perencanaan dan pengembangan Smart City Kabupaten Aceh Selatan melalui pendekatan 6 (enam) dimensi yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment* secara sistematis, efektif, efisien, logis, kondisional, partisipatif dan realistis sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Aceh Selatan dalam jangka pendek, menengah dan panjang, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerintah Aceh Selatan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

1.3 Landasan Hukum

Terdapat beberapa kebijakan daerah yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun regulasi penyelenggaraan konsep *Smart City* di Aceh Selatan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah tetap berkelanjutan dan ditampung dalam satu wadah.

Tabel 1.1 Landasan Hukum Smart City Kabupaten Aceh Selatan

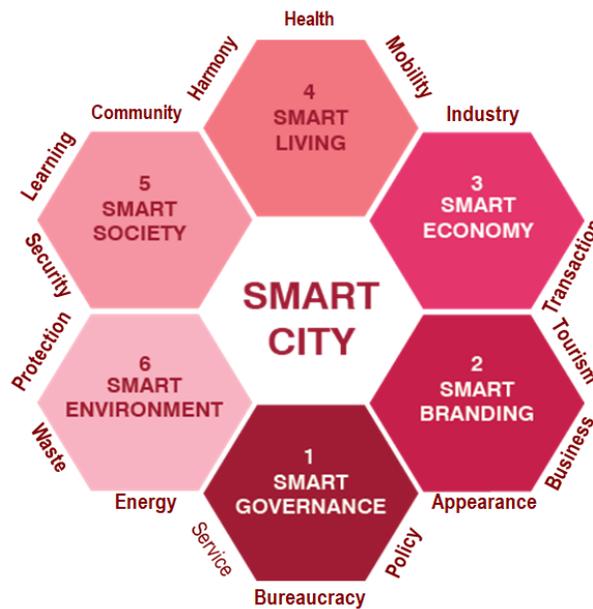
No	Tahun	Nomor	Tentang	Dimensi
1	2017	78	Peraturan Bupati tentang pedoman sistem informasi kampung dalam Kabupaten Aceh Selatan	<i>Smart Society</i> <i>Smart Governance</i>
2	2019	28	Peraturan Bupati tentang rencana induk pengembangan e-government Kabupaten Aceh Selatan	<i>Smart Governance</i>
3	2019	70	Peraturan Bupati tentang pedoman sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dilingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	<i>Smart Governance</i>

No	Tahun	Nomor	Tentang	Dimensi
4	2017	016/482/D ISKOMIN FO/2017	Surat Keputusan Bupati tentang nama domain/ sub domain dan surat elektronik pada satuan kerja perangkat Kabupaten Aceh Selatan	<i>Smart Governance</i>
5	2019	480/24/DI SKOMINF O/2019	Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan/ penetapan tim teknis pengelola website Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2020	<i>Smart Governance Smart Society</i>
6	2019	489/372/D ISKOMIN FO/2019	Informasi dan Pelayanan Informasi (PPID) Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2019	<i>Smart Branding Smart Governance Smart Society</i>
7	2019	070/519/D ISKOMIN FO/2019	Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan/ penetapan komite, tim koordinasi, tim evaluasi dan tim teknik Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan	<i>Smart Governance</i>
8	2019	188.4.45/2 8/HKM/20 19	Website jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2019	<i>Smart Governance</i>
9	2020	061/117/O RGS/2020	Pengelolaan pengaduan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat sistem pengelolaan pengadaan pelayanan publik nasional Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2020	<i>Smart Society Smart Governance</i>

Sumber: JDIH Kabupaten Aceh Selatan, 2020

1.4 Kerangka Pikir Smart City

Kota pintar merupakan sebuah cara untuk membentuk Aceh Selatan menjadi sebuah kota yang layak huni dengan penyediaan fasilitas umum yang memadai agar mampu memberikan berbagai kemudahan dan meningkatkan kesejahteraan serta kenyamanan bagi Masyarakat Aceh Selatan. Dengan identitas sebagai kota yang islami yang menjadikan sebuah keunikan dan nilai tambah sendiri bagi kabupaten Aceh Selatan. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pengembangan konsep *Smart City* di Aceh Selatan haruslah diorientasikan dengan konsep pembangunan bersyariat.



Gambar 1 Dimensi Smart City

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Dimensi pembangunan *Smart City* Aceh Selatan yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Masing-masing dimensi terdiri dari 3 sub pilar dimensi.

a. Smart Governance

Smart Governance merupakan dimensi pembangunan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan kabupaten Aceh Selatan yang dilaksanakan secara pintar, sehingga *Smart Governance* dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran pemerintahan yang memberikan layanan publik yang efisien dan berkualitas kepada masyarakat, memantau pembangunan dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pembangunan. *Smart Governance* terdiri dari tiga sub pilar berikut:

1. *Public Service*, yaitu meningkatkan layanan publik
2. *Bureaucracy*, yaitu meningkatkan kinerja birokrasi
3. *Public Policy*, yaitu peningkatan efisiensi kebijakan publik

b. Smart Branding

Smart Branding merupakan dimensi pembangunan *Smart City* yang fokus dalam meningkatkan daya saing Aceh Selatan dan memasarkan potensi kota dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Pemasaran potensi kabupaten Aceh Selatan ini diharapkan dapat mendorong aktivitas perekonomian dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Smart Branding* terdiri dari tiga sub pilar berikut:

1. *Tourism*, yaitu membangun ekosistem pariwisata
2. *Business*, yaitu membangun daya saing bisnis (industri kreatif)
3. *Appearance*, yaitu penataan wajah daerah

c. Smart Economy

Smart Economy merupakan pembangunan tata kelola perekonomian yang mampu menghadapi tantangan dan adaptif terhadap perubahan sehingga terwujudnya ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah. Pada akhirnya diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat ditunjang secara efektif dan efisien serta berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Smart Economy* terdiri dari tiga sub pilar berikut:

1. *Industry*: penataan industri primer, sekunder dan tersier
2. *Welfare*: peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. *Transaction*: membangun ekosistem keuangan

d. Smart Living

Smart Living merupakan dimensi pembangunan tata kelola kelayakan taraf hidup masyarakat kabupaten Aceh Selatan sehingga mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak, nyaman, dan efisien bagi masyarakat. *Smart Living* terdiri dari tiga sub pilar berikut:

1. *Harmony*, yaitu harmonisasi tata ruang dan lingkungan yang nyaman
2. *Health*, yaitu menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan
3. *Mobility*, yaitu membangun sarana transportasi dan logistic

e. Smart Society

Smart Society merupakan dimensi pembangunan tata kelola ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis, baik antar individu, antara individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok. Interaksi masyarakat diharapkan terjalin intensif sehingga membentuk sebuah tatanan yang produktif secara positif dengan digital literasi yang baik. *Smart Society* terdiri dari tiga sub pilar berikut:

1. *Community*, yaitu membangun masyarakat yang pintar
2. *Learning*, yaitu membangun sistem edukasi yang efisien
3. *Security*, yaitu menjamin keamanan dan keselamatan

f. *Smart Environment*

Smart Environment merupakan dimensi pembangunan tata kelola lingkungan yang pintar. Di mana pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat berorientasi pada lingkungan hidup, sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. *Smart Environment* terdiri dari tiga sub pilar berikut:

1. *Protection*, yaitu perlindungan lingkungan
2. *Waste*, yaitu tata kelola sampah dan limbah
3. *Energy*, yaitu membangun tata kelola energi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan

II. VISI SMART CITY KABUPATEN ACEH SELATAN

2.1 Visi Smart City Kabupaten Aceh Selatan

Adapun Visi *Smart City* Kabupaten Aceh Selatan adalah:

“Terwujudnya Daerah Yang Berdaya Saing Dan Inovatif Didukung Sinergi Masyarakat Damai, Sehat, Cerdas, Religius Dan Bermartabat Menuju Masyarakat Aceh Selatan Adil Dan Sejahtera”.

2.2 Misi Smart City Kabupaten Aceh Selatan

Agar pencapaian visi *Smart City* Kabupaten Aceh Selatan tersebut dapat diwujudkan, maka disusunlah 6 (enam) misi yang dapat mendukung pelaksanaannya yaitu:

Tabel 2 1 Misi Smart City Kabupaten Aceh Selatan

Misi	Misi <i>Smart City</i> Aceh Selatan	Dimensi Smart City
Misi 1	Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan, partisipatif dan komunikatif	<i>Smart Governance</i>
Misi 2	Mewujudkan Aceh Selatan untuk berinovasi dengan menjadi pusat wisata alam yang cerdas dan berbudaya	<i>Smart Branding</i>
Misi 3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat	<i>Smart Economy</i>
Misi 4	Mewujudkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas untuk masyarakat yang sehat dan cerdas	<i>Smart Living</i>
Misi 5	Mewujudkan masyarakat saling kolaborasi untuk tetap berdaya saing damai	<i>Smart Society</i>
Misi 6	Mewujudkan daerah yang indah tetap sejuk serta berkelanjutan	<i>Smart Environment</i>

2.3 Sasaran Dan Tujuan Smart City Kabupaten Aceh Selatan

Tabel 2.2 Sasaran dan Tujuan Smart City Kabupaten Aceh Selatan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN			
Misi 1: Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang yang efektif, efisien, transparan, partisipatif dan komunikatif							
	1.1.	Pelayanan publik dan birokrasi yang efektif, efesien dan transparan	1.1.1	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis SPBE	1.1.1.1	Penyediaan dan peningkatan 3 domain penilaian Pemingkatan SPBE	Indeks SPBE
					1.1.1.2	Penyediaan SOP terkait pelayanan public	Persentase jumlah SOP terkait layanan Public
			1.1.2.	Menghadirkan sistem pelayanan publik yang lebih efektif, efisen, mudah dan berkualitas.	1.1.2.1	Meningkatkan pemanfaatan layanan secara elektronik sebagai media yang dapat diakses oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasinya beberapa layanan publik - Indeks kepuasan masyarakat

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
			1.1.3.	Menghasilkan kebijakan – kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.	1.1.3.1	Memberikan aksesibilitas publik yang partisipatif dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengakses system open data - Jumlah program yang ditawarkan masyarakat dalam sistem musrembang
					1.1.3.2	Pengambilan keputusan berdasarkan data	Integrasi beberapa layanan aplikasi
Misi 2: Mewujudkan Aceh Selatan terus berinovasi dengan menjadi pusat wisata alam yang cerdas dan berbudaya							
	2.1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	2.1.1	Meningkatnya pembangunan industri kreatif	2.1.1.1	Peningkatan pembangunan industri dan ekonomi kreatif	Persentase perkembangan industri dan ekonomi kreatif
			2.1.2	Meningkatnya neraca perdagangan	2.1.2.1	Peningkatan daya saing dan diversifikasi produk	Meningkatnya jumlah produk unggulan khas Aceh Selatan
			2.1.3	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	2.1.3.1	Peningkatan jumlah investasi	Meningkatnya jumlah investor
					2.1.3.2	Penguatan destinasi wisata halal	Persentase kunjungan wisatawan

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
	2.2	Meningkatkan kualitas informasi terkait wisata	2.2.1.	Menampilkan informasi positif tentang daerah dan wisata alam	2.2.1.1	Mengembangkan literasi digital di masyarakat	
					2.2.1.2	Pembuatan SOP tentang literasi digital terkait pariwisata	Tersedianya SOP terpadu terkait pariwisata
	2.3	Pengelolaan data wisatawan dan budget wisata	2.3.1.	Mendapatkan data yang akurat tentang pariwisata	2.3.1.1	Pemanfaatan teknologi informasi tentang pariwisata	Tersedianya layanan aplikasi pariwisata terpadu
			2.3.2.	Mendapat kolekting data terkait keluhan dan masukan terkait dengan pariwisata	2.3.2.1	Penerapan big data analytic untuk DSS	Tersedianya data terkait Parawisata
Misi 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat							
	3.1.	Penguatan tatanan ekonomi di dalam ekosistem pelayanan, pengelolaan dan transaksi keuangan.	3.1.1.	Menguatkan kelompok usaha dan koperasi syariah	3.1.1.1	Integrasi layanan UMKM dan IKM dengan koperasi syariah, dan market place local	Persentase Peningkatan Debitur di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
					3.1.1.2	Mengembangkan dan menguatkan lembaga/usaha ekonomi berbasis syariah yang dapat membantu pemodalannya UKM/IKM secara syariah	Peningkatan kualitas UKM/IKM
					3.1.1.3	Pembuatan dan Pengembangan produk hukum pendukung ekonomi Syariah.	Regulasi terkait Ekonomi Syariah
			3.1.2	Peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan dan pengelolaan pendapatan daerah.	3.1.2.1	Pemanfaatan Teknologi informasi dalam Sistem Perencanaan dan Pendataan Sumber Daya Ekonomi	Pertumbuhan PDRB
					3.1.2.2	Memaksimalkan sumber penerimaan, retribusi dan pajak daerah	Persentase peningkatan retribusi dan pajak daerah

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
	3.2.	Terciptanya ekosistem industri pendukung Smart City.	3.2.1	Membangun ekonomi industri yang berdaya saing dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan daerah dan pengembangan usaha mikro.	3.2.1.1	Pemetaan dan penataan industri primer, skunder dan tersier dengan pemanfaatan teknologi informasi	Persentase pertumbuhan UKM/IKM
					3.2.1.2	Peningkatan peran UKM/IKM dan penataan pedagang kaki lima	Tata kelola UKM/IKM dan pedagang kaki lima

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
			3.2.2	Membangun dan mengembangkan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan, sebagai pendukung Smart city.	3.2.2.1	Integrasi antara industri primer (perikanan) dan (pertanian, kehutanan) dari kabupaten tetangga dengan industri sekunder pengepakan, branding dan lain-lain dan terelasi juga dengan sektor jasa (tersier) yang dapat membuka peluang kerja baru dari integrasi antar tipe industri tersebut.	Tersedianya system yang terintegrasi antar industri, kebutuhan dan permintaan
					3.2.2.2	Mewujudkan pengembangan sentra industri	Bertambahnya jumlah sentra industri
					3.2.2.3	Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang	Stabilisasi harga produk di pasaran
			3.2.3	Mendorong Pengembangan Kewirausahaan sebagai pendukung industri 4.0	3.2.3.1	Mendorong berkembangnya startup – startup digital.	Persentase pertumbuhan industri pendukung 4.01

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
			3.2.4	Meningkatkan jumlah Investasi.	3.2.4.1	Peningkatan potensi daerah melalui promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak	Jumlah investor & Nilai Investasi
	3.3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3.3.1	Pengembangan dan Peningkatan kualitas daripada BUMG dan UMKM	3.3.1.1	Menumbuh kembangkan UKM, IKM dan industri kreatif seperti program OVOP	Tingkat Pengangguran Terbuka & Angka Kemiskinan
					3.3.1.2	Penyaluran modal usaha berdasarkan prinsip Syariah	Peningkatan persentase penyaluran modal usaha berdasarkan prinsip syariah
					3.3.1.3	Penyediaan Lapangan Kerja dan lapangan Usaha sesuai dengan potensi Gampong	Berkurangnya persentase pengangguran
					3.3.1.4	Memberikan bantuan tepat sasaran	Berkurangnya masyarakat miskin

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN			
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan masyarakat yang sehat dan cerdas							
	4.1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	4.1.1.1 .	Optimalisasi jaminan kesehatan dengan integrasi sistem jaminan kesehatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Kesehatan - Terintegrasinya layanan kesehatan terpadu
					4.1.1.2 .	Melaksanakan program Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Peningkatan persentase area KTR
					4.1.1.3 .	Peningkatan kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat	Persentase perbaikan gizi masyarakat
	4.2.	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan public	4.2.1.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan layanan public lainnya	4.2.1.1	Penguatan fasilitas kesehatan	Pembangunan fasilitas kesehatan yang ramah anak

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
					4.2.1.2	Integrasi layanan puskesmas, rumah sakit dengan sistem kependudukan dan lainnya yang dianggap perlu	Mendaftar di puskesmas dan rumah sakit cukup dengan ktp dan pengambilan no secara online
	4.3.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	4.3.1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	4.3.1.1	Peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Berkurangnya PMKS
			4.3.2.	Meningkatnya kesejahteraan disabilitas	4.3.2.1	Pemenuhan kebutuhan kaum difabel	Bertambahnya lapangan kerja bagi kaum difabel
					4.3.2.2	lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah bantuan bagi PMKS dan Difabel
	4.4.	Gampong Sehat	4.4.1.	Terwujudnya kesehatan bagi masyarakat dengan indikator umur harapan hidup lebih tinggi, rendahnya angka kematian dan kesakitan	4.4.1.1	Menguatkan Program KTR	Peningkatan persentase area KTR

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
					4.4.1.2 .	Pembangunan IPAL komunal hanya pada kawasan permukiman dan tempat ibadah.	Bertambahnya jumlah IPAL komunal
	4.5.	Meningkatkan kualitas pendidikan	4.5.1.	Meningkatkan mutu tenaga pendidik	4.5.1.1 .	Meningkatkan kedisiplinan tenaga pendidik berbasis TIK	Tersedianya system e-disiplin untuk tenaga pendidik
			4.5.2.	Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses belajar mengajar	4.5.1.2 .	Penerapan Teknologi Informasi	- Jumlah pengakses layanan e-learning
Misi 5: Mewujudkan masyarakat saling kolaborasi untuk tetap berdaya saing dan damai							
	5.1.	Peningkatan pelayanan public dan monitoring	5.1.1	Memudahkan memonitor aktivitas kota	5.1.1.1 .	Command Center	- Durasi (cepat tanggap) tindakan atas laporan kejadian
Misi 6: Mewujudkan daerah yang indah tetap sejuk serta berkelanjutan.							

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
	6.1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dan berkesinambungan	6.1.1.	Meningkatkan pelayanan terkait dengan tata kelola sumber daya air, tanah, ruang terbuka hijau dan udara yang berkelanjutan.	6.1.1.1	Pemanfaatan teknologi GIS dan IOT	- Tersedianya layanan berbasis spasial Terpasangnya perangkat teknologi IOT terkait lingkungan dan Alam
			6.1.2.	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan persampahan dan pengolahan limbah dan industri rumah tangga secara aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.	6.1.2.1	Pengembangan dan penguatan Sistem <i>Waste Collecting Point</i> (WCP)	- Peningkatan depo WCP di tiap-tiap gampong
					6.1.2.2	Pengembangan industri Pengelolaan sampah	Berkembangnya industri pengolahan sampah

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
					6.1.2.3 .	Peningkatan pengelolaan sampah menjadi energi dan pemanfaatan untuk industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan sampah untuk energi - Peningkatan Industri kreatif menggunakan barang bekas
			6.1.1.	Peningkatan ruang terbuka yang ramah anak	6.1.1.1	Pengembangan dan pembangunan taman rekreasi di pusat Kota	
					6.1.1.2 .	Pengelolaan dan pengendalian dalam memelihara kondisi taman	
					6.1.1.3 .	Sinkronisasi Antara Perencanaan Pembangunan dengan kebutuhan ruang terbuka hijau, jalur sepeda dan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis lingkungan	

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		INDIKATOR KEBERHASILAN
	6.2	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi yang ramah lingkungan	6.2.1.	Meningkatkan penggunaan energi yang ramah lingkungan.	6.2.1.1 .	Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan	
			6.2.2.	Meningkatkan Efisiensi energi	6.2.2.1 .	Pengembangan green building	

2.4 Hubungan Misi Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan dan Dimensi Smart City

Tabel 2.3 Hubungan Misi Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan dan Dimensi Smart City

MISI SMART CITY		MISI RPJMD 2017-2022	
Misi 1	Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan, partisipatif dan komunikatif	Misi 6	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
Misi 2	Mewujudkan Aceh Selatan untuk berinovasi dengan menjadi pusat wisata alam yang cerdas dan berbudaya	Misi 3	Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang mandiri
Misi 3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat	Misi 1	Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing
		Misi 8	Mewujudkan ketahanan pangan
Misi 4	Mewujudkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas untuk masyarakat yang sehat dan cerdas	Misi 4	Mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan
Misi 5	Mewujudkan masyarakat saling kolaborasi untuk tetap berdaya saing damai	Misi 2	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter
		Misi 7	Mewujudkan kedamaian, kecerdasan spiritual dan keshalehan masyarakat
Misi 6	Mewujudkan daerah yang indah tetap sejuk serta berkelanjutan	Misi 5	Mewujudkan pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup

III. STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

3.1 Smart Governance

Pemetaan strategi pembangunan Smart City dengan fokus pada dimensi Smart Governance melibatkan penggunaan metodologi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Dalam proses ini, kita akan menganalisis dan mengevaluasi kekuatan (Strengths) yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan tata kelola smart city, kelemahan (Weaknesses) yang perlu ditingkatkan, peluang (Opportunities) yang dapat dimanfaatkan, dan ancaman (Threats) yang harus dihadapi. Di bawah ini, kami

merinci hasil pemetaan strategi menggunakan pendekatan SWOT untuk dimensi Smart Governance:

Tabel 3.1 Analisis SWOT Dimensi Smart Governance

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>Faktor Internal</p>	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan Berbagai Pihak: Terhubung dengan Dinas Perpustakaan Aceh, BAPPEDA, BPKD, dan Sekdakab. 2. Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian: Menyediakan layanan data dan informasi kepegawaian, serta unit penilaian kompetensi pegawai yang terintegrasi. 3. Pelayanan Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Informasi: Menyediakan pelayanan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. 4. Penerimaan Usulan Pembangunan Infrastruktur: Menerima proposal usulan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, dan fasilitas sanitasi dari masyarakat. 5. Kerjasama dengan Instansi Terkait: BAPPEDA, BPKD, Setdakab, KOMINSA, BKPSDM, Inspektorat, dan MPA (Aceh). 6. Penggunaan Aplikasi untuk Pemberdayaan Masyarakat: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMG dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan gampong, DPMG sudah menggunakan beberapa aplikasi seperti Aplikasi Seukedes, Aplikasi SIGAP, Aplikasi SIPADES, OSPAM, dll. 7. Pendidikan Tinggi dalam DPMG: Dari 25 orang Pegawai/ASN pada DPMG, terdapat 4 orang berpendidikan S2, dan 12 orang berpendidikan S1. 8. SDM yang Mampu Menggunakan Teknologi Informasi: DPMG memiliki 9 orang ASN yang mampu 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan tenaga pustakawan dan kearsipan. 2. Terbatasnya anggaran dinas. 3. Perlunya Penyempurnaan dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan dan Informasi Kepegawaian terpadu yang belum efektif. 4. Kurangnya tenaga analis dan programer yang menguasai Teknologi Informasi/IT untuk mengolah data pegawai dan tidak adanya Data Base kepegawaian. 5. Belum menerapkan pemberian Reward dan Punishment. 6. Pemberian Tunjangan belum sesuai beban kerja masih disamaratakan. 7. Belum tersedia Komputer (PC)/Laptop dengan spesifikasi yang memadai saat ini. 8. Belum tergalinya potensi SDM secara optimal. 9. Belum tersusunnya standar kinerja pegawai yang terukur. 10. Penempatan sumberdaya aparatur yang belum tepat sasaran.
<p>Faktor Eksternal</p>		

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	menggunakan teknologi informasi.	
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah oleh BAPPEDA. Fungsi dalam Struktur Bappeda semakin lengkap adanya Bidang Perencanaan, Pendanaan, dan Evaluasi dan PP koordinasi. 	<p>Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Strategi 1: Maksimalkan Kerjasama dengan Berbagai Pihak. Manfaatkan kerjasama yang sudah ada dengan Dinas Perpustakaan Aceh, BAPPEDA, BPKD, dan Sekdakab untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengintegrasikan sumber daya. Contoh: Kolaborasi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan. Strategi 2: Perluas Layanan Data dan Informasi Kepegawaian Kembangkan layanan data dan informasi kepegawaian yang lebih komprehensif untuk memenuhi kebutuhan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam membangun citra positif lembaga dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Strategi 3: Tingkatkan Pelayanan Penyimpanan dan Pendokumentasian Fokus pada peningkatan pelayanan penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi yang lebih efisien. Ini dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akses informasi bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Strategi 4: Manfaatkan Penerimaan Usulan Pembangunan Infrastruktur 	<p>Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> Strategi 1: Peningkatan Tenaga Pustakawan dan Kearsipan Prioritaskan rekrutmen tenaga pustakawan dan kearsipan yang berkualifikasi untuk memperkuat tim Anda. Ini akan membantu dalam manajemen data dan informasi yang lebih efisien. Strategi 2: Pengelolaan Anggaran dengan Bijak Manfaatkan anggaran yang terbatas secara efisien dengan mengidentifikasi prioritas dan mengalokasikan sumber daya ke area yang paling krusial. Ini dapat melibatkan kolaborasi dengan BAPPEDA untuk mendukung proyek-proyek strategis. Strategi 3: Penyempurnaan Aplikasi Pelayanan dan Informasi Kepegawaian Fokus pada pengembangan dan penyempurnaan aplikasi kepegawaian yang sudah ada. Pastikan aplikasi tersebut menjadi alat yang lebih efektif dan terintegrasi dalam mendukung manajemen kepegawaian. Strategi 4: Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan tenaga analis dan programmer yang dapat mengolah data pegawai. Sertakan pengembangan database kepegawaian yang efektif untuk manajemen data yang lebih baik. Strategi 5: Implementasi Sistem Reward dan Punishment

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<p>Lebih aktif dalam mempromosikan program penerimaan usulan pembangunan infrastruktur dan berkomunikasi dengan masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif. Ini akan memungkinkan pengembangan infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>5. Strategi 5: Perkuat Kerjasama dengan Instansi Terkait</p> <p>Tingkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti BAPPEDA, BPKD, Setdakab, KOMINSA, BKPSDM, Inspektorat, dan MPA (Aceh) untuk memaksimalkan efektivitas program pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>6. Strategi 6: Lebih Manfaatkan Aplikasi untuk Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Terus tingkatkan penggunaan aplikasi untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Pastikan bahwa pegawai memiliki pelatihan yang cukup dalam penggunaan aplikasi ini dan bahwa aplikasi tersebut diperbarui sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>7. Strategi 7: Manfaatkan Pendidikan Tinggi dalam DPMG</p> <p>Libatkan staf yang berpendidikan tinggi dalam proses pengambilan keputusan strategis dan analisis yang lebih mendalam. Mereka dapat memainkan peran kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan program-</p>	<p>Mulailah menerapkan sistem reward dan punishment yang dapat memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi dan mendorong peningkatan kinerja secara keseluruhan.</p> <p>6. Strategi 6: Penyesuaian Tunjangan dengan Beban Kerja</p> <p>Evaluasi kembali skema tunjangan untuk memastikan bahwa kompensasi sesuai dengan beban kerja masing-masing pegawai.</p> <p>7. Strategi 7: Peningkatan Infrastruktur Teknologi</p> <p>Perbarui infrastruktur IT dengan menyediakan komputer/laptop dengan spesifikasi yang memadai untuk mendukung efisiensi dan produktivitas.</p> <p>8. Strategi 8: Pengembangan Potensi SDM</p> <p>Fokus pada pengembangan potensi SDM secara optimal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.</p> <p>9. Strategi 9: Penyusunan Standar Kinerja Pegawai yang Terukur</p> <p>Bentuk standar kinerja yang jelas dan terukur untuk memotivasi pegawai mencapai hasil yang diharapkan.</p> <p>10. Strategi 10: Penempatan Sumber Daya yang Tepat Sasaran</p> <p>Tinjau ulang penempatan sumber daya aparatur untuk memastikan bahwa mereka ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas program.</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats

	<p>program yang lebih canggih.</p> <p>8. Strategi 8: Tingkatkan Kemampuan SDM dalam Teknologi Informasi</p> <p>Fokus pada peningkatan kompetensi teknologi informasi di seluruh lembaga. Ini akan memungkinkan DPMG untuk mengadopsi solusi teknologi yang lebih canggih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka.</p> <p>9. Strategi 9: Manfaatkan Peraturan Perundang-Undangan yang Mendukung</p> <p>Manfaatkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah oleh BAPPEDA. Pastikan bahwa DPMG berperan aktif dalam mematuhi dan memaksimalkan manfaat dari peraturan tersebut.</p> <p>10. Strategi 10: Perkuat Fungsi dalam Struktur Bappeda</p> <p>Manfaatkan peran DPMG dalam struktur BAPPEDA yang semakin lengkap dengan adanya Bidang Perencanaan, Pendanaan, dan Evaluasi. Ini akan memungkinkan DPMG untuk berkontribusi secara lebih efektif dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.</p>	
--	--	--

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan dan Akta Catatan Sipil; 2. Keadaan ekonomi masyarakat yang cenderung rendah; 3. Keterbatasan anggaran pada dinas. 4. Perubahan Iklim yang menyebabkan erosi dan aliran air dipermukaan, kekeringan, kelebihan air yang selanjutnya terjadi banjir dan tanah longsor. 5. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan hidup. 6. Alih fungsi lahan yang semakin meningkat. 7. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dari kegiatan atau pelaku usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Penguatan Kesadaran Masyarakat Aktif melaksanakan program-program informasi dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan dan Akta Catatan Sipil. Ini dapat melibatkan kerjasama dengan pihak terkait, termasuk Dinas Perpustakaan Aceh, untuk menyediakan literatur dan program edukasi. 2. Strategi 2: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan kepada usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini dapat membantu meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat dan memperkuat hubungan dengan pihak-pihak yang terkait. 3. Strategi 3: Pengelolaan Anggaran dengan Bijak Manfaatkan anggaran yang terbatas dengan bijak dengan mengidentifikasi prioritas dan mengalokasikan sumber daya ke program-program yang paling strategis. Pastikan anggaran digunakan secara efisien dan transparan. 4. Strategi 4: Penanganan Dampak Perubahan Iklim Fokus pada perencanaan dan implementasi strategi penanganan dampak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Fokus pada rekrutmen dan pelatihan tenaga pustakawan, kearsipan, analis, dan programmer untuk memperkuat tim Anda dalam mengelola data dan teknologi informasi. Ini dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga yang ada. 2. Strategi 2: Pengelolaan Anggaran Efisien Prioritaskan alokasi anggaran ke program-program dan proyek yang paling penting. Lakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pengeluaran untuk memastikan efisiensi. 3. Strategi 3: Pengembangan Aplikasi Kepegawaian Fokus pada pengembangan dan penyempurnaan aplikasi kepegawaian terpadu yang efektif untuk meningkatkan manajemen data pegawai. 4. Strategi 4: Pelatihan Teknologi Informasi/IT Sediakan pelatihan intensif untuk staf agar dapat menguasai teknologi informasi dan IT, yang memungkinkan mereka mengelola data pegawai dan mengolah informasi secara efektif. 5. Strategi 5: Implementasi Sistem Reward dan Punishment Menerapkan sistem reward dan punishment yang dapat memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi dan meningkatkan akuntabilitas.

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<p>perubahan iklim, seperti pencegahan erosi, manajemen banjir, dan mitigasi kekeringan. Kolaborasi dengan instansi terkait seperti BAPPEDA untuk melaksanakan proyek-proyek berkelanjutan.</p> <p>5. Strategi 5: Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup</p> <p>Kerjasama dengan inspektorat dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan hidup dan memastikan bahwa kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dipantau dan ditindaklanjuti.</p> <p>6. Strategi 6: Pengendalian Alih Fungsi Lahan</p> <p>Terlibat dalam perencanaan tata ruang yang lebih baik untuk mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai. Hal ini dapat melibatkan kolaborasi dengan BAPPEDA dan KOMINSA.</p> <p>7. Strategi 7: Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p> <p>Manfaatkan aplikasi dan teknologi yang sudah ada untuk memantau pencemaran dan kerusakan lingkungan dari kegiatan atau pelaku usaha. Informasi ini dapat digunakan untuk tindakan yang lebih efektif dan penegakan hukum.</p>	<p>6. Strategi 6: Penyesuaian Tunjangan dengan Beban Kerja</p> <p>Evaluasi ulang skema tunjangan untuk memastikan bahwa kompensasi pegawai sesuai dengan beban kerja dan kinerja mereka.</p> <p>7. Strategi 7: Peningkatan Infrastruktur Teknologi</p> <p>Perbarui infrastruktur IT dengan memastikan bahwa setiap staf memiliki akses ke komputer/laptop dengan spesifikasi yang memadai.</p> <p>8. Strategi 8: Pengembangan Potensi SDM</p> <p>Sediakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas staf.</p> <p>9. Strategi 9: Penyusunan Standar Kinerja Pegawai yang Terukur</p> <p>Bentuk standar kinerja yang terukur untuk memotivasi pegawai mencapai hasil yang diharapkan.</p> <p>10. Strategi 10: Penempatan Sumber Daya yang Tepat Sasaran</p> <p>Tinjau ulang penempatan sumber daya aparatur untuk memastikan bahwa mereka ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas program.</p> <p>11. Strategi 11: Kesadaran Masyarakat</p> <p>Aktif melaksanakan program informasi dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan Akta Catatan Sipil.</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
		<p>12. Strategi 12: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</p> <p>Fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk membantu meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat.</p> <p>13. Strategi 13: Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim</p> <p>Fokus pada strategi penanganan dampak perubahan iklim, seperti pencegahan erosi, manajemen banjir, dan mitigasi kekeringan. Kolaborasi dengan instansi terkait dan organisasi lingkungan.</p> <p>14. Strategi 14: Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup</p> <p>Tingkatkan upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan pastikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dipantau dan ditindaklanjuti.</p> <p>15. Strategi 15: Pengendalian Alih Fungsi Lahan</p> <p>Terlibat dalam perencanaan tata ruang untuk mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai. Ini dapat melibatkan kolaborasi dengan instansi terkait.</p> <p>16. Strategi 16: Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Terapkan langkah-langkah untuk meminimalkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dari kegiatan atau pelaku usaha.</p>

Smart Governance dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip tata kelola Smart City yang mencakup koordinasi dan integrasi dalam perencanaan dan pengendalian pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ini bertujuan untuk

memperkuat tata kelola SPBE dari tingkat kabupaten hingga tingkat gampong di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, serta membangun fondasi yang mendukung semua aspek Smart City.

Smart Governance dilaksanakan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mematuhi prinsip-prinsip berikut:

1. **Efektivitas:** Maksimalkan penggunaan sumber daya yang mendukung SPBE sesuai dengan kebutuhan.
2. **Keterpaduan:** Integrasi sumber daya yang mendukung SPBE.
3. **Kesinambungan:** Melaksanakan SPBE secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan sesuai perkembangannya.
4. **Efisiensi:** Optimalisasi penggunaan sumber daya yang mendukung SPBE dengan cara yang tepat.
5. **Akuntabilitas:** Menyediakan kejelasan mengenai fungsi dan pertanggungjawaban pelaksanaan SPBE.
6. **Interoperabilitas:** Mendorong koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis serta antar sistem elektronik untuk pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
7. **Keamanan:** Menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan informasi, infrastruktur SPBE, serta aplikasi SPBE.

Smart Governance di Kabupaten Aceh Selatan akan difokuskan pada tiga area utama dan delapan indikator berikut:

1. Pelayanan Publik:

- a. Layanan Administrasi Masyarakat: Menyediakan layanan administratif kepada masyarakat melalui proses yang efektif, efisien, dan ramah masyarakat.
- b. Layanan Informasi Publik: Meningkatkan akses terhadap informasi pemerintah yang penting bagi masyarakat, termasuk data publik, kebijakan, dan berita penting.

- c. Layanan Sosial Masyarakat: Meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan dukungan lainnya untuk memenuhi kebutuhan beragam masyarakat.

2. Manajemen Birokrasi yang Efisien:

- a. Akuntabilitas Tata Kelola E-Birokrasi: Memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan di dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik didasarkan pada prinsip akuntabilitas, termasuk pelaporan yang transparan dan pertanggungjawaban yang jelas.
- b. Transparansi dalam Kepemerintahan: Membangun tingkat keterbukaan dan akses informasi yang tinggi untuk memungkinkan partisipasi publik, mendukung perencanaan yang lebih baik, dan meminimalkan risiko korupsi.
- c. Implementasi E-Government: Mendorong integrasi teknologi informasi dalam berbagai aspek pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, menyederhanakan proses, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

3. Manajemen Kebijakan Publik:

Partisipasi dalam Perencanaan Publik: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Akses Informasi Publik: Memberikan akses yang mudah dan luas kepada informasi publik yang relevan, termasuk data, rencana, dan kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat memiliki informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan.

Tabel 3.2 Strategi Pembangunan Smart Governance

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Public Service</i>	Peningkatan kualitas layanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan sarana pengaduan. 2. Mendirikan Klinik Konsultasi Berliterasi. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dalam mensosialisasikan Qanun dan peraturan pemerintah oleh Bupati/Walikota. 5. Membentuk admin pelayanan kepegawaian yang terintegrasi. 6. Meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. 7. Mengelola informasi dan komunikasi publik. 8. Membangun Mall Pelayanan Publik (MPP). 9. Mengoptimalkan Sistem Jaringan Intra Pemerintah. 10. Mengembangkan Data Center. 11. Mengembangkan Jaringan Komputer yang Terkoneksi Internet.
<i>Bureaucracy</i>	Indeks SPBE	Penerapan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Aceh Selatan
	Peningkatan kualitas pengawasan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan regulasi tentang Masterplan Smart City. 2. Membentuk Dewan Smart City Daerah. 3. Menyusun pedoman evaluasi pelaksanaan Smart City. 4. Menyusun kebijakan pengelolaan persampahan. 5. Membentuk organisasi tingkat Kabupaten, sebagai pelaksana Smart City.
<i>Public Policy</i>	Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menangani gangguan keteriban umum, ketentraman masyarakat, dan pelanggaran Qanun Syariat Islam. 2. Memantau pendalaman akidah masyarakat. 3. Mensosialisasikan hukum syariat Islam untuk mencegah pendalaman akidah.

3.2 Smart Branding

Tabel 3.3 Analisis SWOT Dimensi Smart Branding

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi dalam Pengelolaan Media Sosial: Memperoleh penghargaan sebagai Terbaik III dalam pengelolaan media sosial Dinas Perhubungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilaksanakannya amanat UUPA (UU No.11 Tahun 2006) yaitu peralihan kantor pertanahan (BPN) menjadi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan sehingga

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>Faktor Eksternal</p>	<p>Kabupaten/Kota se-Aceh tahun 2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penghargaan Terakhir: DPMG telah mendapatkan beberapa penghargaan dalam beberapa tahun terakhir. 3. Sudah mendapatkan penghargaan lingkungan hidup: Memiliki penghargaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 	<p>tugas pokok dan fungsi terkait urusan pertanahan kabupaten Aceh Selatan belum dilaksanakan secara maksimal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dukungan pendaan/ Anggaran Daerah masih sangat minim. 3. Tidak ada Personel Yang Membidangi Pengujian Kendaraan Bermotor. 4. Tidak ada Penyidik PPNS untuk menguji Pelanggaran Angkutan Barang Lalu Lintas di Jalan Raya. 5. Tidak adanya Staf Yang Membidangi Di Setiap Bidang. 6. Tidak Tersedianya Gedung Untuk Bongkar Muat Barang di Terminal. 7. Terlambatnya Setoran Mobil Perintis. 8. Sarana Dan Prasarana Di Beberapa Unit Harus Diperbaiki. 9. Tidak terjadinya kerjasama yang baik antara komisioner MPD dengan Sekretariat MPD. 10. Masing-masing antara komisioner MPD dan Sekretariat MPD harus saling bekerja sama agar terciptanya sasaran kinerja yang diharapkan. 11. Fasilitas kantor yang memadai terutama atap tidak bocor. 12. Tidak menjalankan tupoksi kerja masing-masing. 13. Pembaruan fasilitas kantor. 14. Kurang Sinkronnya usulan penganggaran dengan implementasi anggaran yang tersedia. 15. Peremajaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan pembelian alat berat yang baru.
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub. 2. Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub. 3. Kepercayaan masyarakat yang meningkat dalam 	<p>Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Pemanfaatan Prestasi dalam Pengelolaan Media Sosial <p>Maksimalkan penggunaan media sosial dan manfaatkan prestasi sebagai Terbaik III dalam pengelolaan media sosial sebagai alat untuk memperkuat citra dan hubungan dengan masyarakat. Terus berinovasi dalam konten</p>	<p>Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Implementasi Amanat UUPA (UU No. 11 Tahun 2006) <p>Upayakan agar amanat UUPA yang mengenai peralihan kantor pertanahan (BPN) menjadi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan dengan segera. Ini akan membantu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terkait</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>mendukung upaya yang dilakukan Dishub.</p>	<p>media sosial dan berinteraksi secara aktif dengan pengikut Anda.</p> <p>2. Strategi 2: Promosikan Penghargaan dan Prestasi</p> <p>Gunakan penghargaan yang telah Anda terima sebagai sarana untuk mempromosikan DPMG dan membangun citra yang lebih positif di mata masyarakat dan pihak terkait.</p> <p>3. Strategi 3: Tingkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Lanjutkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang telah meraih penghargaan dengan lebih berfokus pada inovasi dan praktik berkelanjutan. Ini dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan citra lingkungan yang baik.</p> <p>4. Strategi 4: Tingkatkan Keterbukaan dan Partisipasi Publik</p> <p>Manfaatkan semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik untuk memungkinkan masyarakat/stakeholder memberikan aspirasi positif dan masukan yang berharga. Buat platform yang memudahkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di Dishub.</p> <p>5. Strategi 5: Peningkatan Pelayanan Publik</p> <p>Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditawarkan oleh Dishub. Dapat melibatkan perbaikan proses, pelatihan pegawai, dan penggunaan</p>	<p>urusan pertanahan dengan lebih efektif.</p> <p>2. Strategi 2: Peningkatan Dukungan Anggaran</p> <p>Upayakan peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk memungkinkan operasional Dishub berjalan lebih efisien dan efektif.</p> <p>3. Strategi 3: Penyediaan Personel untuk Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <p>Rekrut personel yang memiliki kualifikasi untuk menguji kendaraan bermotor dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pelatihan yang diperlukan.</p> <p>4. Strategi 4: Penyidik PPNS untuk Pelanggaran Angkutan Barang Lalu Lintas</p> <p>Bekerjasama dengan pihak terkait untuk memiliki penyidik PPNS yang dapat menguji pelanggaran angkutan barang di jalan raya.</p> <p>5. Strategi 5: Penambahan Personel pada Setiap Bidang</p> <p>Prioritaskan rekrutmen staf yang dibutuhkan dalam setiap bidang untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi kerja.</p> <p>6. Strategi 6: Penyediaan Fasilitas Bongkar Muat Barang di Terminal</p> <p>Upayakan untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk bongkar muat barang di terminal, yang dapat membantu dalam mengoptimalkan operasional.</p> <p>7. Strategi 7: Perbaiki Setoran Mobil Perintis</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<p>teknologi untuk memudahkan akses masyarakat ke layanan.</p> <p>6. Strategi 6: Membangun dan Mempertahankan Kepercayaan Masyarakat</p> <p>Lakukan komunikasi yang jelas dan transparan dalam menjalankan tugas dan program Dishub. Bangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan mereka.</p> <p>7. Strategi 7: Pengembangan Kemitraan dengan Pihak Terkait</p> <p>Tingkatkan kerjasama dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, organisasi lingkungan, dan pihak swasta, untuk mendukung program-program lingkungan hidup dan pelayanan publik yang lebih baik.</p>	<p>Tingkatkan pengawasan dan penegakan setoran mobil perintis secara tepat waktu.</p> <p>8. Strategi 8: Pembaruan Sarana dan Prasarana</p> <p>Prioritaskan pembaruan sarana dan prasarana di beberapa unit yang memerlukan perbaikan untuk mendukung operasional yang lebih efisien.</p> <p>9. Strategi 9: Peningkatan Kerjasama antara Komisioner MPD dan Sekretariat MPD</p> <p>Fasilitasi komunikasi yang lebih baik dan kerjasama yang efektif antara komisioner MPD dan sekretariat MPD untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan.</p> <p>10. Strategi 10: Peremajaan Fasilitas Kantor</p> <p>Prioritaskan peremajaan fasilitas kantor, terutama yang berhubungan dengan kebocoran atap dan perlengkapan yang sudah usang.</p> <p>11. Strategi 11: Peningkatan Pelaksanaan Tupoksi</p> <p>Pastikan bahwa staf menjalankan tupoksi kerja masing-masing sesuai dengan peraturan dan tugas yang telah ditetapkan.</p> <p>12. Strategi 12: Sinkronisasi Usulan Penganggaran</p> <p>Tingkatkan sinkronisasi antara usulan penganggaran dengan implementasi anggaran yang tersedia. Pastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
		<p>13. Strategi 13: Peremajaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor</p> <p>Lakukan peremajaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang sudah usang untuk mendukung operasional yang lebih efisien.</p>
<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya dana yang dibutuhkan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan. 2. Adanya tekanan dari pihak luar dalam penggunaan dana desa, yang menginginkan isi perbub pedoman penggunaan dana desa dibuat diluar petunjuk teknis dari kemendes. 3. Dibukanya klinik dan rumah sakit swasta akan menajamkan persaingan rumah sakit, pada sisi lain kesiapan manajemen rumah sakit belum optimal, ada kemungkinan semakin beratnya beban rumah sakit untuk tetap eksis. 4. Mindset masyarakat penerima pelayanan / kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit yang Kurang sehingga ada kemungkinan terjadinya ketidakpuasan pelanggan berkaitan dengan service yang diberikan berdasarkan mindset petugas. 	<p>Strategi Ancaman dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Pemanfaatan Prestasi dan Penghargaan <p>Maksimalkan penggunaan prestasi dalam pengelolaan media sosial dan penghargaan yang telah diterima untuk memperkuat citra DPMG di mata masyarakat dan pihak terkait. Gunakan ini sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan.</p> 2. Strategi 2: Terus Tingkatkan Kinerja untuk Memenangkan Penghargaan <p>Jangan puas dengan prestasi yang telah diperoleh. Terus tingkatkan kinerja DPMG untuk meraih penghargaan lebih banyak di masa mendatang.</p> 3. Strategi 3: Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup <p>Lanjutkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan penghargaan dengan lebih berfokus pada praktik-praktik berkelanjutan dan inovasi.</p> 4. Strategi 4: Pencarian Sumber Dana Alternatif <p>Cari sumber dana alternatif untuk mengatasi kurangnya dana yang</p> 	<p>Strategi Kelemahan dan Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Implementasi Amanat UUPA (UU No.11 Tahun 2006) <p>Upayakan agar amanat UUPA yang mengenai peralihan kantor pertanahan (BPN) menjadi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan dengan segera. Ini akan membantu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terkait urusan pertanahan dengan lebih efektif.</p> 2. Strategi 2: Pencarian Sumber Dana Alternatif <p>Cari sumber dana alternatif untuk mengatasi kurangnya dukungan pendaan/anggaran daerah. Ini dapat melibatkan kolaborasi dengan pihak swasta, organisasi donor, atau proyek-proyek pembiayaan lainnya.</p> 3. Strategi 3: Penyediaan Personel untuk Pengujian Kendaraan Bermotor <p>Rekrut personel yang memiliki kualifikasi untuk menguji kendaraan bermotor dan pastikan mereka mendapatkan pelatihan yang diperlukan.</p> 4. Strategi 4: Penyidik PPNS untuk Pelanggaran Angkutan Barang Lalu Lintas <p>Berkolaborasi dengan instansi terkait atau aparat penegak hukum untuk memiliki</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<p>dibutuhkan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan. Ini dapat melibatkan kolaborasi dengan pihak swasta atau organisasi donor.</p> <p>5. Strategi 5: Kedewasaan Manajemen Penggunaan Dana Desa</p> <p>Berkomunikasi dengan pihak luar yang tertarik dalam penggunaan dana desa dan usahakan untuk mencapai kesepakatan yang memadai. Pastikan bahwa petunjuk teknis dari kemendes tetap diikuti untuk memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan sesuai aturan.</p> <p>6. Strategi 6: Peningkatan Manajemen Rumah Sakit</p> <p>Fokus pada peningkatan manajemen rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ini meliputi pelatihan pegawai, perbaikan proses, dan penggunaan teknologi yang efisien.</p> <p>7. Strategi 7: Perbaikan Mindset Masyarakat dan Petugas</p> <p>Lakukan program edukasi dan komunikasi untuk mengubah mindset masyarakat terkait rumah sakit dan juga pegawai. Pastikan bahwa pelayanan diberikan dengan baik dan profesional.</p> <p>8. Strategi 8: Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat</p> <p>Komunikasikan secara jelas dan transparan tentang pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Bangun hubungan yang kuat dengan masyarakat</p>	<p>penyidik PPNS yang dapat menguji pelanggaran angkutan barang di jalan raya.</p> <p>5. Strategi 5: Penambahan Personel pada Setiap Bidang</p> <p>Prioritaskan rekrutmen staf yang dibutuhkan dalam setiap bidang untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi kerja.</p> <p>6. Strategi 6: Pemenuhan Fasilitas dan Sarana Prasarana</p> <p>Prioritaskan pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan, termasuk gedung untuk bongkar muat barang di terminal. Ini akan membantu dalam meningkatkan operasional.</p> <p>7. Strategi 7: Perbaikan Sistem Setoran Mobil Perintis</p> <p>Tingkatkan sistem setoran mobil perintis untuk memastikan setoran tepat waktu.</p> <p>8. Strategi 8: Peningkatan Kerjasama antara Komisioner MPD dan Sekretariat MPD</p> <p>Fasilitasi komunikasi yang lebih baik dan kerjasama yang efektif antara komisioner MPD dan sekretariat MPD untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan.</p> <p>9. Strategi 9: Peremajaan Fasilitas Kantor</p> <p>Prioritaskan peremajaan fasilitas kantor, terutama yang berhubungan dengan atap yang bocor.</p> <p>10. Strategi 10: Peningkatan Pelaksanaan Tupoksi</p> <p>Pastikan bahwa staf menjalankan tupoksi kerja masing-masing sesuai dengan</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats

	<p>untuk meningkatkan kepercayaan mereka.</p>	<p>peraturan dan tugas yang telah ditetapkan.</p> <p>11. Strategi 11: Sinkronisasi Penganggaran dan Implementasi</p> <p>Tingkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara usulan penganggaran dengan implementasi anggaran yang tersedia. Pastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.</p> <p>12. Strategi 12: Peremajaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor</p> <p>Lakukan peremajaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang sudah usang untuk mendukung operasional yang lebih efisien.</p> <p>13. Strategi 13: Manajemen Penggunaan Dana Desa yang Cerdas</p> <p>Kelola dana desa dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dari kemendes dan pastikan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak luar.</p> <p>14. Strategi 14: Persiapan Manajemen Rumah Sakit</p> <p>Tingkatkan persiapan dan manajemen rumah sakit untuk bersaing dengan klinik dan rumah sakit swasta yang akan buka. Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen yang lebih efisien.</p> <p>15. Strategi 15: Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat</p> <p>Komunikasikan secara jelas dan transparan tentang pelayanan yang diberikan dan bangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas.</p>
--	---	---

Dalam konsep Smart City, dimensi kedua yang dikenal sebagai Smart Branding memiliki peran penting. Smart Branding adalah serangkaian upaya cerdas yang bertujuan untuk membranding daerah dengan efektif. Konsep ini melibatkan inovasi dalam pemasaran daerah dengan tujuan utama meningkatkan daya saing daerah. Hal ini dicapai dengan mengembangkan tiga elemen utama: pariwisata, bisnis, dan penampilan kota. Sasaran utama dari Smart Branding adalah meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan tampilan kota dan promosi potensi daerah, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Strategi utama dalam mencapai Smart Branding melibatkan pemahaman konsep Smart City Branding, yang fokus pada peningkatan daya saing daerah melalui sektor pariwisata, bisnis, dan penampilan kota. Di Kabupaten Aceh Selatan, perhatian khusus diberikan pada sektor pariwisata, dengan penekanan khusus pada ekowisata. Pemilihan sektor ekowisata didasarkan pada ketersediaan lokasi ekowisata yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

Strategi pemasaran daerah melalui brand daerah yang kuat menjadi pedoman penting dalam merumuskan strategi, taktik, dan visualisasi brand kota. Dengan mengimplementasikan strategi Smart Branding yang kuat, diharapkan daya tarik investasi di Kabupaten Aceh Selatan dapat meningkat. Oleh karena itu, panduan yang jelas diperlukan untuk memperkuat daya saing melalui strategi pemasaran di era digital, dengan harapan investor akan tertarik untuk berinvestasi di daerah ini. Selain itu, pengembangan kemampuan pelayanan yang prima (soft skill) juga menjadi faktor kunci yang mendukung citra positif daerah dalam konteks konsep Smart City.

Tabel 3.4 di bawah ini menguraikan strategi pembangunan Smart Branding Kabupaten Aceh Selatan. Tabel ini merinci langkah-langkah praktis yang diambil untuk mewujudkan konsep Smart Branding di lapangan.

Tabel 3.4 Strategi Pembangunan Smart Branding

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Tourism</i>	Pengembangan Ekosistem Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Aceh Selatan Integrated Smart Tourism and Seaport (Pelabuhan dan Wisata Cerdas Terintegrasi). 2. Penyusunan kebijakan kepariwisataan 3. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 4. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota 5. Penyelenggaraan promosi penanaman modal 6. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal 7. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal 8. Pengembangan sistem pelayanan publik yang prima
<i>Business</i>	Pegembangan Ekonomi Kreatif Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggiatkan pomosi penanaman modal. 2. Pengembangan Dashboard <i>E-Commerce</i> yang terintegrasi dengan Aceh Selatan <i>Command Center</i> (ATCC) 3. Mendorong semangat wirausaha melalui organisasi kepemudaan, komunitas pemuda dan pelajar 4. Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan 5. Pengembangan kawasan wisata kuliner yang kaya rasa, kaya menu, nyaman dan aman
	Meningkatkan pembangunan pariwisata yang berkualitas secara merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Appearance</i>	Terciptanya Wajah Kota Dengan Tata Ruang Yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan taman kota yang nyaman, aman dan layak bagi anak, pemuda dan lansia. 2. Peningkatan layanan publik <i>wifi</i> yang mengedukasi user 3. Pembuatan papan informasi nilai sejarah pada bangunan-bangunan kota pusaka 4. Pengembangan pola navigasi wisata digital

3.3 Smart Economy

Tabel 3.5 Analisis SWOT Dimensi Smart Economy

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Fisik Unggul: Memiliki aset fisik seperti gedung kantor, gedung Perpustakaan Kecamatan, tanah, dan anggaran yang memadai. 2. Pelayanan Aplikasi Website kepada OPD: Menyediakan layanan aplikasi web kepada OPD yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. 3. SDM TI: Memiliki 9 orang staf TI. 4. Sistem Informasi Pertanahan (SIMTANAH): Memiliki Sistem Informasi Pertanahan yang penting. 5. Aset Pengukuran yang Berkualitas: Memiliki aset penting seperti drone dan alat ukur topografi. 6. Mobil Bus dan Mobil Perintis yang Tersedia: Tersedia mobil bus dan mobil perintis yang digunakan oleh masyarakat. 7. Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Memadai: Memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. 8. Pelayanan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis: Menyediakan pelayanan dokter spesialis dan sub-spesialis. 9. Tenaga Medis dan Non Medis Berkualitas: Jumlah tenaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tergalinya potensi SDM secara optimal. 2. Peremajaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan pembelian alat berat yang baru. 3. Kekurangan Staf yang memahami tugas yang diberikan. 4. Tidak adanya workshop untuk alat berat sehingga perawatan alat berat memerlukan biaya lebih. 5. Masih terbatasnya Asset DPMG yang dapat menunjang kinerja, seperti Jumlah laptop/PC masih terbatas baik dalam jumlah dan spek masih rendah. Kondisi perlengkapan yang dimiliki DMG juga banak dalam kondisi rusak (Meja kerja). 6. Masih kurangnya SDM yang ada pada DMPG, baik dalam jumlah maupun pada kompetensi ang dimilikinya. 7. Anggaran yang tersedia terbatas sehingga belum bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat. 8. Tidak disediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas ASN (anggaran BIMTEK, dll).

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang
<p>1. Dukungan APBK dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas pegawai melalui beasiswa tugas belajar, Pendidikan Kepemimpinan, dan Bimbingan Teknis dari instansi vertikal.</p> <p>3. Mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi.</p> <p>4. Sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah provinsi dan kabupaten.</p> <p>5. Unsur Pimpinan Pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Selatan sangat mendukung amanat (UU No.11 Tahun 2006) dengan dialihkannya Kantor Pertanahan (BPN) menjadi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan.</p> <p>6. Perubahan regulasi/ peraturan dari kementerian PUPR dan LKPP mempengaruhi Dinas secara positif dan membuat pegawai yang terlibat di kegiatan fisik lebih terlindungi dari proses hukum.</p> <p>7. Menciptakan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kinerja.</p> <p>8. Tempatkan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi dan disiplin ilmunya.</p>	<p>3. Strategi 1: Optimalisasi Pemanfaatan Aset Fisik</p> <p>Manfaatkan aset fisik yang dimiliki dengan baik, seperti gedung kantor, gedung perpustakaan, tanah, dan anggaran yang memadai. Pastikan aset-aset ini digunakan secara efisien untuk mendukung berbagai kegiatan dan program.</p> <p>4. Strategi 2: Peningkatan Pelayanan Aplikasi Website kepada OPD</p> <p>Terus tingkatkan pelayanan aplikasi web kepada OPD dengan memastikan aplikasi-aplikasi tersebut relevan, user-friendly, dan memberikan nilai tambah bagi pengguna.</p> <p>5. Strategi 3: Pengembangan SDM TI</p> <p>Lanjutkan pengembangan SDM TI dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan kepada staf TI. Pastikan mereka tetap terkini dengan perkembangan teknologi informasi.</p> <p>6. Strategi 4: Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan (SIMTANAH)</p> <p>Manfaatkan sistem informasi pertanahan (SIMTANAH) dengan maksimal untuk memudahkan pengelolaan data pertanahan dan memberikan pelayanan yang</p>	<p>1. Strategi 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <p>Prioritaskan pelatihan dan pengembangan SDM yang ada untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mereka terhadap tugas yang diberikan.</p> <p>2. Strategi 2: Peremajaan Peralatan dan Peningkatan Perlengkapan</p> <p>Ajukan proposal untuk peremajaan peralatan, termasuk pembelian alat berat yang baru, serta perbaikan perlengkapan gedung kantor yang rusak. Ini dapat memungkinkan kinerja yang lebih baik dan efisien.</p> <p>3. Strategi 3: Peningkatan Kapasitas Staf</p> <p>Berikan pelatihan dan workshop kepada staf yang bertanggung jawab terhadap alat berat. Ini akan membantu dalam perawatan dan pengoperasian yang lebih efisien.</p> <p>4. Strategi 4: Peningkatan Aset dan Sarana Prasarana</p> <p>Usulkan peningkatan jumlah dan kualitas aset yang mendukung kinerja DPMG, seperti laptop/PC, meja kerja, dan sarana prasarana lainnya.</p> <p>5. Strategi 5: Peningkatan Kapasitas SDM</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>9. Peningkatan PAD.</p>	<p>lebih efisien kepada masyarakat.</p> <p>7. Strategi 5: Pemeliharaan Aset Pengukuran yang Berkualitas</p> <p>Terus pemeliharaan dan pembaruan aset pengukuran yang berkualitas seperti drone dan alat ukur topografi untuk mendukung survei dan pemetaan yang akurat.</p> <p>8. Strategi 6: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat</p> <p>Manfaatkan mobil bus dan mobil perintis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pastikan kendaraan ini digunakan secara efisien.</p> <p>9. Strategi 7: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</p> <p>Lakukan pemeliharaan rutin pada fasilitas sarana dan prasarana yang memadai agar tetap dalam kondisi baik.</p> <p>10. Strategi 8: Pengembangan Layanan Kesehatan</p> <p>Terus tingkatkan layanan kesehatan dengan mempekerjakan tenaga medis dan non-medis berkualitas dan mengoptimalkan fasilitas yang ada.</p> <p>11. Strategi 9: Pemanfaatan Monitor Deteksi Gempa</p> <p>Manfaatkan monitor deteksi gempa untuk meningkatkan kewaspadaan dan respons terhadap potensi bencana gempa.</p> <p>12. Strategi 10: Peningkatan Kapasitas Pegawai</p> <p>Manfaatkan dukungan beasiswa tugas belajar, Pendidikan Kepemimpinan,</p>	<p>Prioritaskan pengembangan SDM dengan rekrutmen tambahan yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mendukung tujuan dan program DPMG.</p> <p>6. Strategi 6: Optimalisasi Penggunaan Anggaran</p> <p>Manfaatkan anggaran yang tersedia dengan sebaik mungkin, dan prioritaskan penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat. Lakukan alokasi anggaran yang efisien.</p> <p>7. Strategi 7: Penyediaan Anggaran untuk Peningkatan Kapasitas ASN</p> <p>Upayakan alokasi anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas ASN, termasuk pelatihan (BIMTEK), sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja mereka.</p> <p>8. Strategi 8: Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>Tingkatkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mendapatkan dukungan anggaran dan berbagi sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan.</p> <p>9. Strategi 9: Manfaatkan Dukungan Unsur Pimpinan</p> <p>Manfaatkan dukungan unsur pimpinan pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Selatan dalam pelaksanaan amanat UU No. 11 Tahun 2006.</p> <p>10. Strategi 10: Inovasi dalam Kinerja</p> <p>Dorong tim untuk menciptakan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<p>dan Bimbingan Teknis untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam menghadapi tugas dan tantangan yang semakin kompleks.</p> <p>13. Strategi 11: Sinergi dengan Pemerintah Provinsi</p> <p>Tingkatkan sinergi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan dukungan anggaran dan bantuan dalam melaksanakan program dan proyek.</p> <p>14. Strategi 12: Pemanfaatan Dukungan Unsur Pimpinan</p> <p>Manfaatkan dukungan unsur pimpinan pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Selatan dalam pelaksanaan amanat UU No. 11 Tahun 2006.</p> <p>15. Strategi 13: Inovasi dalam Kinerja</p> <p>Mendorong tim untuk menciptakan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam penyelenggaraan program dan proyek.</p> <p>16. Strategi 14: Penempatan Pejabat Struktural yang Kompeten</p> <p>Pastikan pejabat struktural ditempatkan sesuai dengan kompetensinya, sehingga kepemimpinan dalam organisasi dapat optimal.</p> <p>17. Strategi 15: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>Tingkatkan upaya dalam meningkatkan PAD melalui berbagai sumber pendapatan seperti pajak, retribusi, dan lainnya.</p>	<p>kinerja dan efisiensi dalam penyelenggaraan program dan proyek.</p> <p>11. Strategi 11: Penempatan Pejabat Struktural yang Kompeten</p> <p>Pastikan pejabat struktural ditempatkan sesuai dengan kompetensinya, sehingga kepemimpinan dalam organisasi dapat optimal.</p> <p>12. Strategi 12: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>Tingkatkan upaya dalam meningkatkan PAD melalui berbagai sumber pendapatan seperti pajak, retribusi, dan lainnya.</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten. 2. Adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak mendukung upaya peningkatan kualitas perhubungan di Aceh Selatan. 3. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak dapat dibendung penambahan unit kendaraan pribadi. 4. Keterbatasan lahan jalan di Kabupaten Aceh Selatan karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Diversifikasi Pendapatan 2. Berupaya untuk mendiversifikasi sumber pendapatan. Anda dapat mencari sumber pendapatan alternatif di luar APBD, seperti kerjasama dengan sektor swasta atau pendanaan proyek-proyek khusus yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. 3. Strategi 2: Kampanye Kesadaran Masyarakat Selenggarakan kampanye dan program edukasi kepada masyarakat tentang manfaat menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan, serta kesadaran tentang dampak negatif dari peningkatan kendaraan pribadi. 4. Strategi 3: Penggunaan Teknologi untuk Pemantauan Lalu Lintas Manfaatkan SDM TI yang Anda miliki untuk mengembangkan sistem pemantauan lalu lintas yang cerdas dengan menggunakan teknologi terkini. Hal ini dapat membantu mengelola lalu lintas dengan lebih efisien dan mengurangi kemacetan. 5. Strategi 4: Perbaikan dan Pengembangan Infrastruktur Manfaatkan anggaran yang memadai dan aset fisik yang unggul untuk melakukan perbaikan dan pengembangan infrastruktur transportasi. Ini dapat membantu meningkatkan kapasitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Pengembangan SDM dan Peremajaan Peralatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelatihan dan pengembangan SDM internal (kekuatan) untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam perawatan alat berat dan manajemen aset. b. Mencari sumber pendanaan eksternal (peluang) untuk memperbaharui peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak atau usang. 2. Strategi 2: Kemitraan dengan Pihak Eksternal: <ol style="list-style-type: none"> a. Membangun kemitraan dengan lembaga atau perusahaan luar (peluang) yang dapat memberikan dukungan dalam penyediaan workshop dan pelatihan tentang alat berat. b. Memanfaatkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung pengembangan kapasitas ASN (kekuatan). 3. Strategi 3: Optimalisasi Sumber Daya yang Ada: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan penggunaan aset DPMG yang tersedia (kekuatan), termasuk laptop/PC dan peralatan yang masih layak, untuk memaksimalkan kinerja dan pemberdayaan masyarakat. b. Menyusun rencana anggaran yang efisien untuk memanfaatkan sumber daya yang ada (kekuatan) sebaik

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<p>jalan dan transportasi umum.</p> <p>6. Strategi 5: Optimalisasi Pelayanan Kesehatan</p> <p>Manfaatkan dokter spesialis dan sub-spesialis yang tersedia serta tenaga medis dan non medis berkualitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini akan membantu mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.</p> <p>7. Strategi 6: Peningkatan Kesadaran Gempa</p> <p>Lanjutkan pemantauan gempa dan tingkatkan kampanye kesadaran gempa kepada masyarakat. Persiapkan diri untuk menghadapi potensi bencana gempa dan memastikan bahwa personel BPBD yang tersedia siap dalam hal tanggap darurat.</p>	<p>4. Strategi 4: Penyusunan Proposal Anggaran:</p> <p>Menyusun proposal anggaran yang kuat dan berargumentasi untuk mendapatkan dukungan tambahan dari APBD (peluang) atau sumber pendapatan alternatif (kekuatan) yang dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas kantor dan membeli alat berat yang baru.</p> <p>5. Strategi 5: Pengembangan Transportasi Publik yang Berkelanjutan:</p> <p>a. Melakukan studi dan perencanaan transportasi publik yang berkelanjutan (peluang) untuk menghadapi penambahan kendaraan pribadi (ancaman).</p> <p>b. Mendorong penggunaan transportasi publik yang ramah lingkungan (kekuatan) untuk mengatasi pola hidup masyarakat yang suka menggunakan kendaraan pribadi.</p> <p>6. Strategi 6: Kolaborasi dengan Pihak Terkait:</p> <p>Membentuk kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga non-profit, atau perusahaan swasta (peluang) yang memiliki kepentingan dalam peningkatan kualitas perhubungan.</p>

Smart Economy merupakan dimensi ketiga dalam konsep Smart City, yang memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk secara signifikan meningkatkan kualitas perekonomian dan daya saing suatu kota. Konsep Smart Economy bertujuan untuk

menciptakan ekosistem ekonomi yang cerdas, inovatif, dan berkelanjutan, yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

Strategi pembangunan Smart Economy di Kabupaten Aceh Selatan menjadi elemen kunci dalam mewujudkan konsep ini. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang cerdas dan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan serangkaian inisiatif dan tindakan, termasuk pembangunan infrastruktur teknologi yang canggih, dorongan kuat terhadap inovasi dan kewirausahaan, serta pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam era digital.

Konsep Smart Economy di Kabupaten Aceh Selatan mencakup berbagai elemen strategis, termasuk:

1. **Infrastruktur Teknologi:** Meningkatkan ketersediaan infrastruktur teknologi yang handal, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi dan luas, untuk mendukung pertumbuhan bisnis digital dan kreatif.
2. **Inovasi dan Kewirausahaan:** Mendorong budaya inovasi di berbagai sektor ekonomi dan memberikan dukungan kepada pertumbuhan bisnis lokal yang berbasis inovasi.
3. **Pendidikan dan Pelatihan:** Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam teknologi dan ekonomi digital.
4. **Kemitraan dengan Sektor Swasta:** Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5. **Promosi Ekonomi Lokal:** Memasarkan dan mendukung produk dan layanan lokal untuk meningkatkan daya tarik bagi investor dan wisatawan, serta memajukan bisnis lokal.
6. **Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan:** Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan peduli lingkungan dalam pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.6, yang terdapat di bawah, memperinci strategi pembangunan Smart Economy di Kabupaten Aceh Selatan. Tabel ini memberikan gambaran lebih mendalam tentang bagaimana konsep Smart Economy diimplementasikan dalam konteks daerah ini.

Tabel 3.6 Strategi Pembangunan Smart Economy

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Industry</i>	Terciptanya ekosistem industri pendukung <i>Smart City</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Ekonomi Industri yang Berdaya Saing: <ol style="list-style-type: none"> a. Memprioritaskan pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah untuk memperkuat perekonomian lokal. Ini mencakup identifikasi dan promosi sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif di wilayah tersebut. b. Mendukung usaha mikro dan kecil dalam mengakses sumber daya, pelatihan, dan pasar, sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Mengembangkan Keterkaitan Sistem Produksi, Distribusi, dan Pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan integrasi antara sistem produksi, distribusi, dan pelayanan untuk menciptakan efisiensi dan keterkaitan yang lebih baik dalam ekosistem ekonomi daerah. b. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi konektivitas antara berbagai aspek produksi dan distribusi yang berkelanjutan. c. Memfasilitasi ketersediaan teknologi budidaya, sarana prasarana, dan permodalan untuk usaha budidaya, panen, dan pasca panen. d. Mengelola Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. 3. Meningkatkan Iklim Investasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Membangun regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan investasi,

		<p>termasuk insentif fiskal dan perizinan yang lebih efisien.</p> <p>b. Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk menarik investasi lokal dan asing ke daerah tersebut.</p> <p>c. Mempromosikan Kabupaten Aceh Selatan sebagai tujuan investasi yang menarik melalui kampanye pemasaran dan pameran.</p>
<i>Welfare</i>	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	<p>1. Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG):</p> <p>a. Pemberdayaan BUMG: Mendorong pemberdayaan BUMG sebagai entitas ekonomi lokal yang dimiliki oleh gampong (desa). Ini dapat mencakup penyediaan pelatihan, pendampingan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membantu BUMG tumbuh dan berkembang.</p> <p>b. Diversifikasi Usaha: Mendorong BUMG untuk mendiversifikasi usaha mereka sehingga tidak hanya tergantung pada satu jenis usaha. Ini dapat mencakup pengembangan berbagai sektor seperti pertanian, manufaktur, dan jasa.</p> <p>c. Akses ke Pembiayaan: Membantu BUMG dalam mengakses pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan mereka.</p> <p>2. Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Menengah (UKM):</p> <p>a. Pendidikan dan Pelatihan: Menyediakan program pendidikan dan pelatihan kepada pemilik UKM untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha.</p> <p>b. Akses ke Pasar: Membantu UKM dalam mengakses pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional, melalui promosi, kemitraan, dan platform perdagangan elektronik.</p> <p>c. Kemudahan Perizinan dan Regulasi: Meningkatkan kemudahan dalam proses perizinan dan meminimalkan birokrasi yang membebani UKM. Hal ini akan</p>

		<p>memungkinkan UKM berkonsentrasi pada pengembangan usaha mereka tanpa hambatan administratif yang berlebihan.</p> <p>d. Akses Keuangan: Memastikan akses yang lebih baik ke pembiayaan, termasuk kredit mikro dan modal usaha, sehingga UKM dapat tumbuh dan berkembang.</p>
<i>Transaction</i>	Penguatan tatanan ekonomi Syariah di dalam ekosistem pelayanan, pengelolaan dan transaksi keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan Kelompok Usaha dan Koperasi Syariah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan Kelompok Usaha: Mendukung dan memfasilitasi kelompok usaha lokal, termasuk kelompok usaha yang berbasis prinsip-prinsip Syariah. Ini dapat mencakup penyediaan pelatihan, peralatan, dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha mereka. b. Promosi Prinsip Syariah: Memasyarakatkan prinsip-prinsip Syariah dalam bisnis dan usaha lokal dengan mengedukasi dan memberikan informasi kepada pemilik usaha dan masyarakat. Ini juga dapat mencakup promosi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. c. Koperasi Syariah: Mendorong pembentukan dan perkembangan koperasi Syariah sebagai bentuk usaha yang berlandaskan pada nilai-nilai Syariah. Koperasi Syariah dapat menjadi entitas yang kuat dalam pengembangan ekonomi lokal. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk layanan administrasi masyarakat, layanan informasi publik, dan layanan sosial masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan. b. Pengembangan Pendapatan Daerah: Mencari sumber-sumber pendapatan alternatif untuk daerah, seperti pengembangan pariwisata, peningkatan investasi, dan diversifikasi ekonomi. Ini akan membantu daerah menjadi

		<p>lebih mandiri dari sumber pendapatan yang terbatas.</p> <p>c. Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Efisien: Memastikan bahwa pendapatan daerah dikelola dengan efisien, termasuk perencanaan dan penganggaran yang cermat. Pengendalian pengeluaran yang bijak juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah.</p>
--	--	--

3.4 Smart Living

Tabel 3.7 Analisis SWOT Dimensi Smart Living

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Perpustakaan Keliling yang Luas: Menyediakan fasilitas pelayanan Perpustakaan Keliling di seluruh sekolah dan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, termasuk layanan referensi, peningkatan minat baca, serta pengambilan dan penyelamatan arsip. 2. Adanya layanan data dan informasi kepegawaian: Menyediakan layanan data dan informasi kepegawaian yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. 3. Layanan Terminal Kota Fajar: Menyediakan layanan di Terminal Kota Fajar. 4. Tersedianya Mobil Bus dan Mobil Perintis Yang Dikontrakkan dan Digunakan Oleh Masyarakat: Memudahkan transportasi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. 5. Jam Kerja Tim Penanggulangan pada BPBD 24 jam 1 hari sebagai upaya siaga terhadap kejadian Bencana: Meningkatkan kesiapan dan keamanan masyarakat. 6. Sudah melakukan kerjasama antar instansi vertical dengan lembaga-lembaga terkait: Meningkatkan koordinasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi Anggaran bidang kesehatan Kab/Kota masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping anggaran tersebut lebih cenderung untuk upaya kuratif. 2. Penempatan sumber daya manusia belum sesuai kompetensi dan tidak merata 3. Belum efektifnya koordinasi dalam perencanaan antar bidang 4. Kualitas dan Kuantitas Sarana, Prasarana dan Peralatan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masih perlu ditingkatkan 5. Belum optimalnya kelembagaan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan partisipasi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ditandai tingkat keaktifan sarana UKBM yang belum optimal 6. Masih minimnya anggaran dinas, terkait kehidupan sosial masyarakat
Faktor Eksternal		

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	pelayanan kepada masyarakat.	
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub. 2. Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub. 3. Kepercayaan masyarakat yang meningkat dalam mendukung upaya yang dilakukan Dishub. 4. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub. 	<p>Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Optimalkan Layanan Perpustakaan Keliling: <ol style="list-style-type: none"> a. Manfaatkan layanan perpustakaan keliling yang luas (kekuatan) untuk lebih mendekati masyarakat di seluruh kecamatan. b. Tingkatkan kerjasama dengan sekolah dan komunitas lokal untuk meningkatkan minat baca (kekuatan) dan pemanfaatan layanan perpustakaan keliling. 2. Strategi 2: Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kepegawaian: <ol style="list-style-type: none"> a. Gunakan layanan data dan informasi kepegawaian (kekuatan) untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat terkait data pegawai. b. Jadikan data kepegawaian sebagai sumber informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan perencanaan. 3. Strategi 3: Pengembangan Transportasi Publik: <ol style="list-style-type: none"> a. Manfaatkan mobil bus dan mobil perintis yang tersedia (kekuatan) untuk meningkatkan kualitas transportasi publik bagi masyarakat. b. Terus tingkatkan aksesibilitas dan 	<p>Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Peningkatan Alokasi Anggaran untuk Bidang Kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Advokasi dan komunikasikan pentingnya alokasi anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (kelemahan). b. Tingkatkan kerjasama dengan pemangku kebijakan dan stakeholders terkait untuk meningkatkan anggaran yang bersifat preventif dan promotif. 2. Strategi 2: Penempatan Sumber Daya Manusia yang Optimal: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi ulang penempatan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi (kelemahan). b. Pastikan penempatan sumber daya manusia yang sesuai dan merata sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang dan lokasi. 3. Strategi 3: Perbaikan Koordinasi Antar Bidang: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkatkan efektivitas koordinasi dalam perencanaan antar bidang (kelemahan) dengan mengadakan pertemuan rutin dan forum koordinasi. b. Fasilitasi komunikasi lintas-bidang untuk memastikan perencanaan yang lebih terintegrasi. 4. Strategi 4: Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, dan Peralatan:

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<p>ketersediaan transportasi publik (peluang) sesuai dengan harapan masyarakat.</p> <p>4. Strategi 4: Penyediaan Informasi Kesiagaan Bencana:</p> <p>a. Tingkatkan promosi tentang jam kerja tim penanggulangan bencana pada BPBD (kekuatan) sebagai upaya siaga terhadap kejadian bencana.</p> <p>b. Edukasikan masyarakat tentang persiapan dan respons dalam situasi bencana (peluang) untuk meningkatkan keamanan dan kesiapan masyarakat.</p> <p>5. Strategi 5: Kolaborasi Antara Instansi Vertikal:</p> <p>a. Lanjutkan dan perluas kerjasama antar instansi vertikal dengan lembaga-lembaga terkait (kekuatan) untuk meningkatkan koordinasi dan pelayanan yang efisien.</p> <p>b. Manfaatkan kerjasama ini untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>6. Strategi 6: Penggunaan Regulasi Daerah:</p> <p>a. Manfaatkan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub</p>	<p>a. Fokuskan anggaran pada perbaikan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, dan peralatan di unit pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (kelemahan).</p> <p>b. Manfaatkan dana yang tersedia dan usahakan kerjasama dengan pihak ketiga, donatur, atau lembaga internasional.</p> <p>5. Strategi 5: Stimulasi Partisipasi Masyarakat:</p> <p>a. Tingkatkan partisipasi masyarakat dan sarana UKBM (kelemahan) dengan mengadakan program sosialisasi dan pelatihan.</p> <p>b. Libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan.</p> <p>6. Strategi 6: Diversifikasi Sumber Anggaran:</p> <p>a. Cari sumber anggaran alternatif atau diversifikasi sumber anggaran di luar anggaran dinas (kelemahan) untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sosial masyarakat.</p> <p>b. Pertimbangkan kerjasama dengan sektor swasta atau usaha patungan dengan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	(peluang) untuk meningkatkan efektivitas operasional. b. Pastikan kepatuhan terhadap regulasi dan manfaatkan fleksibilitas dalam regulasi yang mendukung tujuan pelayanan publik yang lebih baik.	
<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin pesat yang mendorong ASN yang Profesional efektif, efisien, kreatif, inovatif, dan visioner. Semakin besarnya tuntutan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Semakin besarnya tuntutan sistem penganggaran yang efektif dan efisien. 	<p>Strategi Ancaman dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Strategi 1: Peningkatan Profesionalisme Pegawai: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi (ancaman). Mendorong pegawai untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, inovasi, dan visi dalam bekerja (ancaman). Strategi 2: Pemanfaatan Teknologi Informasi: <ol style="list-style-type: none"> Memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai (ancaman). Menerapkan sistem teknologi informasi dalam berbagai aspek kerja untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan (kekuatan). Strategi 3: Perencanaan dan Penganggaran yang Berkualitas: <ol style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran 	<p>Strategi Kelemahan dan Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> Strategi 1: Peningkatan Alokasi Anggaran Kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> Mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (kelemahan). Mengadvokasi agar lebih banyak dana dialokasikan untuk upaya preventif dan promotif selain kuratif (kelemahan). Strategi 2: Optimalisasi Penempatan Sumber Daya Manusia: <ol style="list-style-type: none"> Menilai ulang penempatan sumber daya manusia agar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (kelemahan). Memastikan penempatan yang merata dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai (kelemahan). Strategi 3: Perbaikan Koordinasi Antar Bidang: <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<p>memenuhi standar berkualitas (ancaman).</p> <p>b. Menggunakan data dan informasi kepegawaian serta layanan perpustakaan untuk mendukung perencanaan yang lebih baik (kekuatan).</p> <p>4. Strategi 4: Kerjasama Antarinstansi:</p> <p>a. Terus mengembangkan dan memperkuat kerjasama antar instansi vertikal dan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat (kekuatan).</p> <p>b. Manfaatkan kerjasama ini untuk mencapai tuntutan sistem penganggaran yang efektif dan efisien (ancaman).</p> <p>5. Strategi 5: Kesiapan Penanggulangan Bencana:</p> <p>a. Lanjutkan dan tingkatkan siaga tim penanggulangan bencana yang siap 24 jam (kekuatan).</p> <p>b. Dukung penanggulangan bencana dengan pemanfaatan teknologi informasi dan perencanaan yang berkualitas (ancaman).</p> <p>6. Strategi 6: Pengembangan Layanan Perpustakaan Keliling:</p> <p>a. Terus tingkatkan layanan</p>	<p>bidang di dalam dinas untuk memastikan perencanaan yang lebih efektif dan efisien (kelemahan).</p> <p>b. Gunakan teknologi informasi untuk memudahkan pertukaran informasi dan koordinasi (ancaman).</p> <p>4. Stratgei 4: Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, dan Peralatan:</p> <p>a. Mengevaluasi dan meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana, prasarana, dan peralatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan (kelemahan).</p> <p>b. Manfaatkan teknologi informasi untuk memantau dan melihara peralatan dengan lebih efektif (ancaman).</p> <p>5. Stratgei 5: Pemberdayaan Masyarakat:</p> <p>a. Mengembangkan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat (UKBM) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (kelemahan).</p> <p>b. Aktif mengajak dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program kesehatan (ancaman).</p> <p>6. Stratgei 6: Pencarian Alternatif Pendanaan:</p> <p>a. Mengidentifikasi sumber dana alternatif dan mencari kerjasama dengan pihak eksternal yang mungkin dapat</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<p>perpustakaan keliling dengan peningkatan referensi, minat baca, dan penyelamatan arsip (kekuatan).</p> <p>b. Gunakan data dan informasi dari layanan ini untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas (ancaman).</p>	<p>mendukung keuangan dinas (kelemahan).</p> <p>b. Mendukung upaya perbaikan sistem penganggaran yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan (ancaman).</p>

Pengembangan hunian dan pola kehidupan cerdas dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan langkah kunci dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan. Strategi pembangunan *Smart Living* mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk memberikan lingkungan yang lebih nyaman, efisien, dan berkelanjutan bagi penduduk. Strategi *Smart Living* ini bertujuan untuk menciptakan komunitas yang cerdas, terkoneksi, dan terinformasi di Kabupaten Aceh Selatan. Tabel 3.8 merupakan strategi pembangunan *Smart Living* Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 3.8 Strategi Pembangunan Smart Living

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Harmony</i>	Terkendalinya Tata Ruang Kabupaten Aceh Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. 3. Pengembangan rencana kawasan di masa depan dengan desain terpadu dan berwawasan lingkungan. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak 5. Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan yang Strategis

		6. Menyusun Kebijakan BLU-e (Bukti Lulus Uji Elektronik).
<i>Health</i>	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kebijakan pelayanan kesehatan telemedicine. 2. Membentuk Tim Perencanaan Pembangunan lanjutan rumah sakit regional. 3. Membentuk Tim pelayanan kesehatan telemedicine. 4. Membentuk Tim Teknis BLU-e. 5. Melanjutkan pembangunan lanjutan rumah sakit regional. 6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan telemedicine. 7. Mengoptimalkan jaringan telekomunikasi Sistem. 8. Menangani Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). 9. Membangun Jaringan Mobilitas Transportasi berbasis CCTV. 10. Mempercepat Penurunan angka stunting.
<i>Mobility</i>	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum, Prasarana dan Sarana Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik 2. Pengembangan sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan transportasi <i>non-motorized</i> 3. Menerapkan kebijakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jam puncak di pusat kota dan pinggiran kota. 4. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Fasilitas Keselamatan Jalan 5. Kegiatan Penyusunan Rencana Perluasan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi

3.5 Smart Society

Tabel 3.9 Analisis SWOT Dimensi Smart Society

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	<p style="text-align: center;">Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Pendidik yang Berkualitas: Memiliki 20 orang staf dengan pendidikan tinggi. 2. Tenaga Honorer yang Berkompeten: Memiliki 10 orang staf tenaga honorer. 3. Staf dengan Pendidikan Tinggi: Terdapat 30 orang staf 	<p style="text-align: center;">Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurang peduli masyarakat terhadap arsip. 2. Kualitas SDM yang sesuai dengan kompetensi masih rendah. 3. Pejabat struktural yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi dan disiplin ilmunya. 4. Sumber daya manusia belum memadai.

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Eksternal	<p>dengan pengetahuan dan pendidikan tinggi.</p> <p>4. Staf yang Kompeten dalam Penggunaan Komputer: Terdapat 50 orang staf yang bisa mengoperasikan komputer.</p>	<p>5. Pemahaman serta dukungan dalam menjaga pelestarian alam dari lembaga pendidikan belum maksimal.</p> <p>6. Minimnya anggaran dalam mendukung kegiatan dan program.</p>
<p style="text-align: center;">Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Betambahnya Pengunjung Keperpustakaan. 2. Mengikuti event-event perlombaan seperti Lomba Inovasi TTG dan Lomba Gampong. 3. Meningkatkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan. 4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kearsipan. 	<p style="text-align: center;">Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Peningkatan Pelayanan dan Pengunjung Perpustakaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelayanan perpustakaan dengan cara menawarkan lebih banyak program dan kegiatan yang menarik bagi masyarakat (peluang). b. Memastikan ketersediaan koleksi buku yang relevan dan up-to-date untuk memikat pengunjung (peluang). 2. Strategi 2: Partisipasi dalam Perlombaan dan Event: <ol style="list-style-type: none"> a. Aktif mengikuti event-event perlombaan seperti Lomba Inovasi TTG dan Lomba Gampong untuk mempromosikan kreativitas dan inovasi dalam pelayanan perpustakaan (peluang). b. Memastikan partisipasi staf yang berkualitas dan berkompeten dalam perlombaan (kekuatan). 3. Peningkatan Pelayanan Kearsipan: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelayanan kearsipan 	<p style="text-align: center;">Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Kearsipan: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian arsip dan kearsipan (peluang). b. Melibatkan staf yang berkualitas dalam menyampaikan informasi tersebut (kelemahan 2). 2. Strategi 2: Partisipasi dalam Lomba dan Event: <ol style="list-style-type: none"> a. Aktif mengikuti event-event perlombaan seperti Lomba Inovasi TTG dan Lomba Gampong untuk mempromosikan kreativitas dan inovasi dalam bidang arsip dan kearsipan (peluang). b. Pastikan bahwa pejabat struktural yang ditempatkan dalam tim perlombaan memiliki kompetensi yang sesuai (kelemahan 3). 3. Strategi 3: Peningkatan Pelayanan Kearsipan: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelayanan kearsipan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pengarsipan dan pelestarian informasi (peluang). b. Memastikan bahwa SDM yang lebih berkualitas dan sesuai

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats

	<p>untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pengarsipan dan pelestarian informasi (peluang).</p> <p>b. Memastikan bahwa staf dengan pendidikan tinggi dan kompeten dapat memberikan pelayanan kearsipan yang berkualitas (kekuatan).</p> <p>4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:</p> <p>a. Mengadakan program-program pendidikan atau kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perpustakaan dan kearsipan (peluang).</p> <p>b. Memanfaatkan tenaga pendidik dan tenaga honorer yang berkualitas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat (kekuatan).</p> <p>5. Penggunaan Teknologi:</p> <p>a. Mengoptimalkan penggunaan teknologi, khususnya komputer, dalam operasional perpustakaan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas (kekuatan).</p> <p>b. Memastikan bahwa staf yang kompeten dalam penggunaan komputer mendukung integrasi teknologi ini (kekuatan).</p>	<p>kompetensi terlibat dalam pelayanan kearsipan (kelemahan 2).</p> <p>4. Strategi 4: Pemantauan Pengunjung Perpustakaan:</p> <p>a. Mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengunjung perpustakaan yang mungkin belum terpenuhi dan melakukan perubahan sesuai kebutuhan (peluang).</p> <p>b. Pastikan bahwa staf yang memahami kompetensi dan mengerti kebutuhan pengunjung terlibat dalam pemantauan ini (kelemahan 2).</p> <p>5. Strategi 5: Pemanfaatan Sumber Daya yang Ada:</p> <p>a. Maksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia dengan memberikan pelatihan atau pengembangan kompetensi kepada staf (kelemahan 2).</p> <p>b. Pastikan pejabat struktural ditempatkan sesuai kompetensi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia (kelemahan 3).</p> <p>6. Strategi 6: Mengukur dan Evaluasi Hasil:</p> <p>Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan hasil pelayanan arsip dan kearsipan secara berkala, dan melakukan perubahan jika diperlukan.</p>
--	---	--

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<p>6. Mengukur dan Evaluasi Hasil:</p> <p>Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan hasil pelayanan perpustakaan secara berkala, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.</p>	
<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurang kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan yang mengakibatkan kebakaran hutan. 2. Masih kurangnya pelatihan-pelatihan tentang kebencanaan untuk Tim Personil penanggulangan bencana. 3. Masih minimnya anggaran yang tersedia. 4. Belum tersedianya dokumen perencanaan Lingkungan Hidup. 5. Pemahaman serta dukungan dalam menjaga pelestarian alam dari lembaga pendidikan belum maksimal. 6. Belum terpenuhi kapasitas laboratorium lingkungan secara kualitas (Standar mutu dan akreditasi) kuantitas (sarana dan prasarana serta jumlah SDM). 7. Minimnya anggaran dalam mendukung kegiatan dan program. 	<p>Strategi Ancaman dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pelestarian Alam: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengadakan program penyuluhan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan alam (ancaman 1). b. Memanfaatkan tenaga pendidik berkualitas untuk menjadi narasumber dalam program-program edukasi tersebut (kekuatan 1). 2. Strategi 2: Pelatihan Personil Penanggulangan Bencana: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelatihan dan persiapan tim penanggulangan bencana dalam menghadapi berbagai situasi kebencanaan (ancaman 2). b. Melibatkan tenaga honorer yang kompeten dalam program pelatihan tersebut (kekuatan 2). 3. Strategi 3: Pengembangan Sumber Daya Manusia: 	<p>Strategi Kelemahan dan Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pelestarian Alam: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengadakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan pelestarian alam (ancaman 1, ancaman 5). b. Membentuk kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pemahaman lingkungan ke dalam kurikulum (ancaman 5). 2. Strategi 2: Peningkatan Kualitas SDM: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun program pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi staf sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing (kelemahan 2). b. Memastikan penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi dan disiplin ilmunya (kelemahan 3). 3. Strategi 3: Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya Manusia: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi sumber daya manusia

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf tentang isu-isu lingkungan dan kebencanaan, termasuk penggunaan komputer (kekuatan 3, kekuatan 4). b. Memastikan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan untuk menangani isu lingkungan dan bencana (ancaman 7). <p>4. Strategi 4: Pengelolaan Anggaran yang Efektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas untuk mendukung program-program keberlanjutan dan perlindungan lingkungan (ancaman 3, ancaman 7). b. Mencari sumber daya tambahan melalui kerjasama dengan lembaga atau program eksternal (misalnya proyek donor) untuk mendukung inisiatif terkait lingkungan (ancaman 3). <p>5. Strategi 5: Pengembangan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dokumen perencanaan lingkungan hidup yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memberikan panduan dalam menjaga pelestarian alam (ancaman 4). 	<p>yang belum memadai dan memprioritaskan alokasi sumber daya manusia untuk bidang yang memerlukan peningkatan (kelemahan 4).</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Membentuk tim internal yang fokus pada perekrutan, pelatihan, dan pengembangan SDM untuk memenuhi kebutuhan organisasi (kelemahan 6). <p>4. Pemanfaatan Anggaran yang Efisien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan perencanaan anggaran yang lebih efisien dengan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pelestarian alam dan mengatasi kekurangan dalam kapasitas laboratorium lingkungan (kelemahan 6, ancaman 3, ancaman 7). b. Mencari sumber daya tambahan melalui kerjasama dengan lembaga atau program eksternal (misalnya proyek donor) untuk mendukung inisiatif terkait lingkungan (ancaman 3). <p>5. Strategi 5: Pengembangan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dokumen perencanaan lingkungan hidup yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memberikan panduan dalam menjaga pelestarian alam (ancaman 4).

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<ul style="list-style-type: none"> b. Melibatkan tenaga pendidik yang berkualitas dalam penyusunan dokumen ini (kekuatan 1). <p>6. Strategi 6: Meningkatkan Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan dalam pelestarian alam (ancaman 5). b. Memanfaatkan tenaga pendidik yang berkualitas untuk menjadi fasilitator dalam program-program ini (kekuatan 1). 	<ul style="list-style-type: none"> b. Melibatkan staf dengan pengetahuan tinggi dalam penyusunan dokumen ini (kelemahan 2, ancaman 4). <p>6. Strategi 6: Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membangun kapasitas laboratorium lingkungan dengan mengakreditasi dan memenuhi standar mutu yang diperlukan (ancaman 6). b. Meningkatkan jumlah staf dan sarana serta prasarana laboratorium yang memadai (ancaman 6). <p>7. Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Pelestarian Alam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengorganisir program sosialisasi yang kreatif dan menarik tentang pelestarian alam yang dapat melibatkan masyarakat (ancaman 1). b. Memanfaatkan tenaga pendidik berkualitas sebagai narasumber dalam program ini (kekuatan 1).

Masyarakat adalah bagian dasar dari setiap kota, dan setiap individu membawa ide, nilai moral, keyakinan, pandangan, kebiasaan, dan harapan masa depan yang berbeda. Dalam konsep Smart Society atau Masyarakat Cerdas, penting untuk meningkatkan interaksi sosial yang positif antara individu, kelompok, dan antar-kelompok.

Smart Society, diperkuat oleh teknologi digital dan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dan sektor swasta, dapat memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti sosial dan ekonomi, serta

membantu pemerintah dan bisnis mencapai efektivitas dalam layanannya. Namun, hal ini hanya dapat tercapai jika semua pihak, yaitu masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah, memiliki pemahaman teknologi informasi dan komunikasi yang setara.

Masyarakat yang tersebar di Kabupaten Aceh Selatan adalah aset berharga dalam pembangunan kota, dan oleh karena itu, perlindungan mereka adalah prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Perlindungan mencakup keamanan, keselamatan, dan upaya untuk menjaga keberlanjutan hidup mereka. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses ke informasi, pengetahuan, dan pelatihan mitigasi bencana. Hal ini membantu mereka dalam menghadapi berbagai risiko dan ancaman yang mungkin muncul dan berdampak pada mereka, keluarga, harta benda, dan lingkungan tempat mereka tinggal.

Kreativitas dan inovasi masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan perkotaan. Dukungan dalam bentuk penelitian dan pengembangan, dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dapat menghasilkan kolaborasi yang membawa semangat keterbukaan dan kerja sama. Hal ini mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan perkotaan dan memajukan daerah Kabupaten Aceh Selatan menuju masa depan yang lebih cerdas. Konsep Smart Society bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Meningkatkan interaksi sosial yang positif di antara individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan.
2. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan pembangunan ekonomi.
3. Memastikan perlindungan dan keberlanjutan hidup masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan melalui pengetahuan mitigasi bencana.
4. Menggali kreativitas dan inovasi masyarakat dalam rangka pembangunan perkotaan yang lebih baik.

Tabel 3.10 di bawah ini memperlihatkan strategi pembangunan Smart Society Kabupaten Aceh Selatan secara lebih rinci, yang memberikan pandangan lebih mendalam tentang bagaimana konsep Smart Society diimplementasikan dalam konteks daerah ini.

Tabel 3.10 Strategi Pembangunan Smart Society

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Community</i>	Meningkatnya Interaksi Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun fasilitas pusat layanan data. 2. Mengoptimalkan dan mempromosikan kebudayaan Aceh Selatan. 3. Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat. 4. Membuat SOP yang mengacu pada peningkatan, efektivitas, dan efisiensi pelayanan. 5. Membuat kebijakan tentang penjadwalan kegiatan rapat-rapat DPRK. 6. Membentuk Kabupaten Layak Anak. 7. Memperkuat, Mengembangkan, Memberdayakan, dan Meningkatkan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam. 8. Peraturan Bupati terkait UPTD. 9. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama. 10. Membuat situs web untuk menampung aspirasi yang akan disampaikan kepada Dewan.
<i>Learning</i>	Meningkatnya Literasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kebijakan pengelolaan pendidikan Smart City Aceh Selatan. 2. Menciptakan lingkungan yang tangguh dalam menghadapi bencana. 3. Mengembangkan peningkatan pengelolaan Dayah yang mandiri. 4. Menyelenggarakan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan Aceh Selatan. 5. Membentuk Tim Pelaksana Rencana Aksi Smart City di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 6. Membentuk Tim Sekretariat Rencana Aksi Smart City di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Meningkatkan pengembangan kelembagaan Dayah yang berstandarisasi. 8. Menyusun kurikulum Aceh Selatan yang islami untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. 9. Mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan pada staf sekretariat DPRK. 10. Mengembangkan piranti pengintegrasian data pendidikan dan kebudayaan di Aceh Selatan. 11. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan telekomunikasi.

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
		12. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di Dayah-dayah.
<i>Security</i>	Meningkatnya Layanan Mitigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran. 2. Membentuk organisasi penanggulangan bencana untuk merumuskan kebijakan kebencanaan. 3. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. 4. Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor.

3.6 Smart Environment

Tabel 3.11 Analisis SWOT Dimensi Smart Environment

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Penting DPMG: DPMG memiliki satu aset penting, yaitu Server untuk Aplikasi sistem Informasi Gampong (SIGAP). 2. Dukungan Teknologi dan Kendaraan: Memiliki kendaraan bermotor dan peralatan komputer. 3. Infrastruktur Milik Pemda: Dinas PUPR memiliki bangunan sendiri. 4. Dukungan Teknologi Informasi: Memiliki aset penting seperti Server SIGAP dan staf yang mampu menggunakan teknologi informasi. 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasana yang masih kurang dalam melakukan penanggulangan bencana. 2. Masih kurangnya pelatihan-pelatihan tentang kebencanaan untuk Tim Personil penanggulangan bencana. 3. Belum tersedianya dokumen perencanaan Lingkungan Hidup. 4. Tidak terpenuhi kapasitas laboratorium lingkungan secara kualitas (Standar mutu dan akreditas) kuantitas (sarana dan prasarana serta jumlah SDM). 5. Minimnya anggaran dalam mendukung kegiatan dan program.
Faktor Eksternal		
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan dukungan anggaran dalam pelaksanaan program kelestarian lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Optimalisasi Aset Penting DPMG: Manfaatkan Server untuk Aplikasi Sistem Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana:

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>2. Dilaksanakannya standar mutu dan akreditasi laboratorium sehingga bisa uji lab secara mandiri</p>	<p>Gamong (SIGAP) secara efisien untuk mendukung pelaksanaan program kelestarian lingkungan (peluang 1).</p> <p>2. Strategi 2: Pemanfaatan Teknologi dan Kendaraan:</p> <p>Gunakan kendaraan bermotor dan peralatan komputer yang Anda miliki untuk memfasilitasi kegiatan lapangan yang terkait dengan kelestarian lingkungan (peluang 1).</p> <p>3. Strategi 3: Pengembangan Infrastruktur Milik Pemda:</p> <p>Manfaatkan infrastruktur milik Dinas PUPR sebagai basis untuk proyek-proyek kelestarian lingkungan (peluang 1).</p> <p>4. Strategi 4: Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi:</p> <p>Tingkatkan pemanfaatan teknologi informasi dengan melibatkan staf yang terampil dalam mengelola Server SIGAP dan sumber daya teknologi informasi lainnya untuk mendukung program kelestarian lingkungan (peluang 1).</p> <p>5. Strategi 5: Standar Mutu dan Akreditasi Laboratorium:</p> <p>Menjalankan proses standar mutu dan akreditasi laboratorium untuk memungkinkan Anda melakukan uji lab secara mandiri. Hal ini akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan Anda</p>	<p>a. Upayakan untuk memperbarui dan memperbaiki sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penanggulangan bencana (kelemahan 1).</p> <p>b. Dapat mencari dukungan dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat, provinsi, atau lembaga donor, untuk meningkatkan infrastruktur dan peralatan yang diperlukan.</p> <p>2. Strategi 2: Pelatihan dan Pendidikan Keamanan dan Kebencanaan:</p> <p>a. Prioritaskan pelatihan dan pendidikan keamanan dan kebencanaan untuk Tim Personil penanggulangan bencana (kelemahan 2).</p> <p>b. Anda dapat mencari lembaga atau organisasi yang spesialis dalam pelatihan kebencanaan untuk bermitra dalam memberikan pelatihan.</p> <p>3. Strategi 3: Pengembangan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup:</p> <p>a. Ajukan permohonan atau usulkan pengembangan dokumen perencanaan lingkungan hidup, yang dapat mendukung program kelestarian lingkungan (kelemahan 3).</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	dalam pengujian lingkungan (peluang 2).	<ul style="list-style-type: none"> b. Dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait atau pihak berwenang dalam pengembangan dokumen ini. <p>4. Strategi 4: Mengajukan Dukungan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Manfaatkan peluang mendapatkan dukungan anggaran dalam pelaksanaan program kelestarian lingkungan (peluang 1). b. Ajukan proposal atau rencana ke pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk anggaran lingkungan. <p>5. Strategi 5: Akreditasi Laboratorium Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Upayakan untuk memenuhi standar mutu dan akreditasi laboratorium lingkungan sehingga Anda dapat melakukan uji lab secara mandiri (peluang 2). b. Ini akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan Anda dalam pengujian lingkungan.
<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya semangat gotong royong masyarakat terhadap lingkungan 2. Perubahan Iklim yang menyebabkan erosi dan aliran air dipermukaan, 	<p>Strategi Ancaman dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Kampanye Kesadaran Lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan kampanye pendidikan untuk meningkatkan 	<p>Strategi Kelemahan dan Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 1: Peningkatan Sarana dan Prasarana: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi dan mengusulkan alokasi anggaran untuk meningkatkan

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>kekeringan, kelebihan air yang selanjutnya terjadi banjir dan tanah longsor.</p> <p>3. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan hidup.</p> <p>4. Alih fungsi lahan yang semakin meningkat.</p> <p>5. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dari kegiatan atau pelaku usaha.</p>	<p>kesadaran masyarakat tentang pentingnya gotong royong dalam menjaga lingkungan (ancaman 1).</p> <p>b. Berpartisipasi dalam program pendidikan lingkungan, workshop, atau kegiatan penyuluhan di masyarakat.</p> <p>2. Strategi 2: Adaptasi Perubahan Iklim:</p> <p>a. Mempersiapkan rencana dan strategi adaptasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim, seperti erosi, banjir, dan kekeringan (ancaman 2).</p> <p>b. Ini dapat mencakup program penanaman pohon, manajemen air, dan sistem peringatan dini.</p> <p>3. Strategi 3: Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan:</p> <p>a. Mendorong penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif dengan berkolaborasi dengan pihak berwenang (ancaman 3).</p> <p>b. Memantau dan melaporkan pelanggaran lingkungan yang terdeteksi.</p> <p>4. Strategi 4: Pengawasan Alih Fungsi Lahan:</p> <p>a. Membentuk tim atau komite yang</p>	<p>sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penanggulangan bencana (kelemahan 1).</p> <p>b. Bermitra dengan organisasi atau lembaga yang berkompeten dalam penanggulangan bencana untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis.</p> <p>2. Strategi 2: Pelatihan Personil Penanggulangan Bencana:</p> <p>a. Menyusun program pelatihan dan pengembangan khusus bagi personil penanggulangan bencana untuk mengatasi kurangnya pelatihan (kelemahan 2).</p> <p>b. Bermitra dengan lembaga pelatihan atau ahli di bidang penanggulangan bencana.</p> <p>3. Strategi 3: Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan:</p> <p>a. Prioritaskan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai dengan regulasi yang berlaku (kelemahan 3).</p> <p>b. Manfaatkan ahli lingkungan atau konsultan jika diperlukan.</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<p>bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan alih fungsi lahan (ancaman 4).</p> <p>b. Mendorong penerapan peraturan terkait penggunaan lahan.</p> <p>5. Strategi 5: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan:</p> <p>a. Menggalakkan praktik bisnis dan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (ancaman 5).</p> <p>b. Mendorong inspeksi dan pengawasan kegiatan industri dan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan.</p> <p>6. Strategi 6: Penggunaan Teknologi dan Kendaraan:</p> <p>a. Manfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan kendaraan bermotor untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan (kekuatan 2).</p> <p>b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengumpulkan data lingkungan.</p> <p>7. Strategi 7: Pemanfaatan Infrastruktur Milik Pemda:</p>	<p>4. Strategi 4: Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan:</p> <p>a. Gencar memperbarui dan meningkatkan fasilitas laboratorium serta meningkatkan kualifikasi SDM (kelemahan 4).</p> <p>b. Berupaya mendapatkan akreditasi laboratorium yang diperlukan.</p> <p>5. Strategi 5: Pengelolaan Anggaran yang Efisien:</p> <p>a. Menerapkan pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan serta mencari alternatif sumber pendanaan, seperti mendapatkan dukungan dari pihak ketiga (kelemahan 5).</p> <p>b. Fokuskan anggaran pada program-program yang memberikan dampak terbesar.</p> <p>6. Strategi 6: Meningkatkan Semangat Gotong Royong:</p> <p>a. Menginisiasi kampanye dan program yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan semangat gotong royong terhadap lingkungan (ancaman 1).</p> <p>b. Ajak masyarakat untuk berpartisipasi</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Manfaatkan infrastruktur milik Pemda, seperti bangunan, sebagai pusat pelatihan atau penyuluhan lingkungan (kekuatan 3). b. Ini akan memungkinkan Anda untuk menjalankan berbagai program lingkungan. <p>8. Strategi 8: Penggunaan Teknologi Informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lanjutkan pengembangan dan pemeliharaan Server SIGAP dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk analisis dan pelaporan data lingkungan (kekuatan 4). b. Dengan ini, Anda dapat memiliki data yang akurat dan terkini tentang kondisi lingkungan. 	<p>aktif dalam program lingkungan.</p> <p>7. Strategi 7: Adaptasi Perubahan Iklim:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kembangkan dan implementasikan rencana adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk mitigasi erosi, pengelolaan air, dan mitigasi banjir (ancaman 2). b. Bermitra dengan lembaga terkait untuk mendukung upaya ini. <p>8. Strategi 8: Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan (ancaman 3). b. Laporan dan bukti yang kuat tentang pelanggaran lingkungan perlu didukung. <p>9. Strategi 9: Pengawasan Alih Fungsi Lahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertahankan keterlibatan aktif dalam pemantauan dan pengawasan alih fungsi lahan (ancaman 4). b. Koordinasikan dengan lembaga terkait untuk memastikan pemantauan yang efektif.

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
		<p>10. Strategi 10: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan pencemaran serta kerusakan lingkungan (ancaman 5). b. Prioritaskan upaya pencegahan dan inspeksi rutin.

Pengembangan lingkungan kota yang cerdas melalui pengelolaan sumber daya lingkungan memerlukan strategi yang kuat dan pemanfaatan teknologi yang terus berkembang. Penting untuk mengembangkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi dalam upaya mengelola lingkungan hidup perkotaan dengan cara yang berkelanjutan.

Ini juga berlaku untuk pengelolaan sumber daya dan limbah di Kabupaten Aceh Selatan. Dengan peningkatan produksi sampah dan limbah, pendekatan "zero waste" yang berfokus pada teknologi, konsep daur ulang, dan ekonomi circular (siklus tertutup) berbasis sampah menjadi kebutuhan mendesak. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan akibat sampah dan limbah, tetapi juga merespons komitmen global untuk mengurangi polusi dan mendukung penggunaan energi terbarukan.

Penting untuk memahami bahwa sumber daya energi fosil semakin terbatas, dan dunia menghadapi tekanan global untuk mengurangi polusi yang berkontribusi pada pemanasan global. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan dan potensinya secara maksimal. Dalam hal ini, sumber daya energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidroelektrik memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tabel 3.12 Strategi Pembangunan Smart Environment

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
<i>Protection</i>	Peningkatan Proteksi Terhadap Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH). 2. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman. 3. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik: <ol style="list-style-type: none"> a. Membangun dan menyediakan area RTH publik yang memadai, sesuai dengan panduan dalam Rencana Tata Ruang kota. b. Memastikan kualitas RTH tersebut dengan perencanaan taman yang baik, penghijauan, dan area terbuka yang nyaman bagi masyarakat. 4. Pemeliharaan dan Pengelolaan RTH Publik: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemeliharaan berkala dan perawatan RTH publik untuk memastikan fungsi ekologis (ekosistem), sosial (kemanfaatan masyarakat), ekonomi (potensi ekonomi), dan estetika (keindahan) terjaga dengan baik. b. Mengoptimalkan penggunaan RTH publik untuk kepentingan lingkungan, masyarakat, dan ekonomi kota. 5. Konservasi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati: <ol style="list-style-type: none"> a. Melestarikan keseimbangan ekosistem di dalam RTH publik dan menjaga keanekaragaman hayati yang ada. b. Memperhatikan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yang ada sebagai bagian integral dari sistem penyangga kehidupan dalam kota.
<i>Waste</i>	Peningkatan Tata Kelola Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. 2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Upaya 3R: <p>Menedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep 3R (Reuse, Reduce, Recycle) yang mencakup praktik-praktik seperti mengurangi limbah, mendaur ulang, dan menggunakan kembali barang-barang. Ini dapat dilakukan melalui</p>

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
		<p>kampanye pendidikan dan informasi yang mudah diakses.</p> <p>3. Pengembangan Sistem Insentif dan Disinsentif untuk 3R:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membangun sistem insentif yang mendorong masyarakat dan bisnis untuk mengadopsi praktik 3R. Hal ini dapat melibatkan penghargaan, pemotongan pajak, atau manfaat lainnya bagi mereka yang berpartisipasi aktif dalam praktik 3R. b. Menetapkan disinsentif atau sanksi bagi pelanggaran terhadap praktik-praktik yang berlawanan dengan 3R, seperti pembuangan sampah ilegal. <p>4. Koordinasi Lintas Sektor dan Perindustrian:</p> <p>Mendorong kerjasama dan koordinasi antara sektor-sektor terkait, khususnya industri dan perdagangan, dalam upaya menerapkan praktik 3R. Ini bisa mencakup kebijakan bersama dan praktik bisnis yang berkelanjutan.</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Sampah:</p> <p>Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan sampah untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, pemrosesan, dan pembuangan sampah berjalan dengan efisien dan sesuai standar kebersihan lingkungan.</p> <p>6. Pendekatan Circular Economy untuk Sampah Rumah Tangga:</p> <p>Mendorong masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga dan mengenali nilai ekonomi dalam beberapa jenis sampah yang dapat didaur ulang atau diolah kembali. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi circular yang berfokus pada penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.</p>

SUB PILAR DIMENSI	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
		<p>7. Peningkatan Ketersediaan Septic Tank Komunal:</p> <p>Meningkatkan ketersediaan septic tank komunal di daerah yang mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur sanitasi. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan sanitasi lingkungan dan mengurangi polusi</p>
<i>Energy</i>	Terciptanya Tata Kelola Energi Yang Berwawasan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup. 2. Peningkatan Penggunaan Tenaga Surya pada Sarana Umum: <ol style="list-style-type: none"> a. Memasang panel surya pada sarana umum seperti taman kota, penerangan jalan, atau bangunan pemerintah untuk menghasilkan energi surya yang ramah lingkungan. b. Memanfaatkan tenaga surya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional, mengurangi emisi karbon, dan menghemat biaya energi. 3. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kedaruratan yang Efisien, Efektif, dan Responsif: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan sistem pelaporan darurat dengan teknologi terkini, seperti aplikasi seluler atau situs web, yang memungkinkan masyarakat untuk dengan cepat melaporkan situasi darurat. b. Memastikan bahwa sistem pelaporan darurat dapat merespons dengan cepat dan efektif terhadap laporan, sehingga bantuan dapat diberikan dalam waktu yang sesuai dalam situasi darurat

IV. RENCANA AKSI SMART CITY

Tahap perencanaan aksi Smart City merupakan fondasi dari upaya perubahan yang terstruktur. Ini dimulai dari identifikasi masalah yang jelas dan spesifik, sehingga rencana aksi yang dihasilkan memiliki tujuan yang dapat diukur dan dapat dicapai, realistis, dan

dengan batas waktu yang ditetapkan. Rencana aksi Smart City Kabupaten Aceh Selatan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Spesifik (Specific): Setiap langkah dalam rencana aksi memiliki tujuan yang terperinci dan jelas. Tidak ada ambiguitas, sehingga semua pihak dapat memahami apa yang ingin dicapai.
2. Terukur (Measurable): Tujuan dan pencapaian dalam rencana aksi dapat diukur dengan indikator yang jelas. Ini memungkinkan untuk memonitor kemajuan dan mengevaluasi keberhasilan dengan data yang dapat diukur.
3. Dapat Dicapai (Achievable): Rencana aksi didesain sedemikian rupa sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Ini memastikan bahwa rencana aksi realistis dan memungkinkan untuk dijalankan.
4. Realistis (Realistic): Rencana aksi mempertimbangkan keterbatasan dan sumber daya yang tersedia. Tujuannya adalah agar rencana tersebut dapat dilaksanakan dalam situasi nyata.
5. Batas Waktu (Timebound): Setiap tindakan memiliki batas waktu yang ditetapkan. Ini menciptakan tanggung jawab untuk menyelesaikan langkah-langkah dalam rencana aksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Rencana aksi Smart City Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari empat rencana:

1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City Kabupaten Aceh Selatan: Fokus pada perencanaan kebijakan dan pembentukan lembaga yang mendukung transformasi menjadi Smart City.
2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City Kabupaten Aceh Selatan: Memusatkan perhatian pada pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung layanan Smart City.
3. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City Kabupaten Aceh Selatan: Menyusun langkah-langkah untuk membangun aplikasi dan perangkat lunak yang mendukung layanan dan inisiatif Smart City.
4. Rencana Penguatan Literasi Smart City Kabupaten Aceh Selatan: Fokus pada peningkatan pemahaman dan literasi masyarakat terkait konsep dan praktik Smart City.

Rencana aksi ini membantu Kabupaten Aceh Selatan dalam perjalanan mereka menuju transformasi menjadi Smart City yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, rencana ini diharapkan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

4.1 Pengembangan Kebijakan Dan Kelembagaan Smart City Kabupaten Aceh Selatan

4.1.1 Kebijakan

Meskipun belum ada Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan Smart City di Kabupaten Aceh Selatan, pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini diatur dengan mengacu pada Buku Perencanaan Induk Pengembangan E-Government Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TIK dan mendorong pembuatan aturan terkait Smart City di Kabupaten Aceh Selatan.

Saat ini, Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Aceh Selatan sedang dalam proses penyusunan masterplan Smart City dan Peraturan Bupati yang akan mengatur pelaksanaan Smart City di kabupaten ini. Untuk memastikan keberlanjutan program Smart City dalam jangka panjang, langkah-langkah ini akan selalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 4.1 Rencana Aksi Pengembangan Kebijakan Smart City Kabupaten Aceh Selatan

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Smart City Aceh Selatan	Peningkatan layanan dan mutu pendidikan	Kualitas layanan dan mutu pendidikan	Disdikbud	<i>Smart Society</i>	2024
Penyusunan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Smart City	Tersusunnya Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Smart City	Peraturan Bupati	Diskominfo Bagian Hukum Setdakab Inspektorat	<i>Smart Governance</i>	2024
Optimalisasi dan promosi kebudayaan Aceh Selatan	Peningkatan kesejahteraan pelaku	Adanya promosi daring dan jumlah	Disdikbud	<i>Smart Society</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
	budaya di Aceh Selatan	even budaya terselenggara			
Menciptakan lingkungan yang tangguh dalam menghadapi bencana	Meningkatnya layanan mitigasi dan penanganan bencana	Persentase penanganan bencana yang sesuai dengan waktu tanggap	BPBD	<i>Smart Society</i>	2024
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebakaran	Jumlah dokumen potensi kebakaran	BPBD/DAMKAR	<i>Smart Society</i>	2024
Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Menguatnya kualitas pemahaman dan pengamalan aqidah, syariah, akhlak, tarbiyah, dakwah/syiar Islam dalam masyarakat berdasarkan Alquran dan hadis	Tingginya Indeks Pembangunan Syariah (IPS)	Dinas Syariah Islam	<i>Smart Society</i>	2024
Pengembangan peningkatan pengelolaan Dayah yang mandiri	Meningkatnya jumlah Dayah mandiri yang berstandarisasi	Tingginya indeks kemandirian Dayah dan berstandarisasi	Dinas Pendidikan Dayah	<i>Smart Society</i>	2024
Penyelenggaraan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan Aceh Selatan	Mewujudkan system penjaminan mutu dalam pencapaian standar pendidikan Aceh Selatan	Persentase regulasi dan pelaporan pencapaian standar pendidikan	MPD	<i>Smart Society</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Membuat SOP yang mengacu pada peningkatan, efektifitas, efesiensi pelayanan	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRK	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan keuangan DPRK	Sekretariat DPRK	<i>Smart Society</i>	2023
Mebuat kebijakan tentang penjadwalan kegiatan rapat rapat DPRK	Terfasilitasi Kegiatan Rapat rapat DPRK	Terlaksananya semua agenda rapat rapat DPRK	Sekretariat DPRK	<i>Smart Society</i>	2023
Percepatan Penurunan angka stunting	Keluarga Beresiko	Menurunnya angka stunting	DP3AKB	<i>Smart Living</i>	2024
Pembentukan Kabupaten Layak Anak	Lintas Sektor	Terpenuhinya Hak-Hak Anak	DP3AKB	<i>Smart Society</i>	2024
Promosi Penanaman Modal	Mengembangkan Aceh Selatan Invesment Lounge	Peningkatan Pelaksanaan Promosi Investasi	DPMTSP	<i>Samart Brending</i>	2024
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meujudkan Aceh Selatan Open Government dengan memperluas Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Diskominsa	<i>Smart Governance</i>	2024-2026
Fasilitasi ketersediaan teknologi budidaya, sarana prasarana dan permodalan untuk usaha budidaya,	Meningkatnya Produksi Bidang Pertanian	Tersedia intensifikasi, ekstensifikasi dan berfungsinya teknologi pertanian	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan Dinas Dakprindakop	<i>Smart Economy</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
panen dan pasca panen					
Kegiatan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Pengembangan rencana pembangunan lanjutan rumah sakit regional	Jumlah dokumen perencanaan ruang MOT	Dinas Kesehatan, RSUDYA	<i>Smart living</i>	2024
Penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan telemedecine	Peningkatan pelayanan kesehatan	Peraturan daerah	Dinas Kesehatan, RSUDYA	<i>Smart living</i>	2024
Penyusunan Kebijakan BLU-e (Bukti Lulus Uji Elektronik)	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Revisi Qanun	Dinas Perhubungan	<i>Smart living</i>	2024
Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Smart City Aceh Selatan	Peningkatan layanan dan mutu pendidikan	Kualitas layanan dan mutu pendidikan	Disdikbud	<i>Smart Society</i>	2024
Optimalisasi dan promosi kebudayaan Aceh Selatan	Peningkatan kesejahteraan pelaku budaya di Aceh Selatan	Adanya promosi daring dan jumlah even budaya terselenggara	Disdikbud	<i>Smart Society</i>	2024
Menciptakan lingkungan yang tangguh dalam menghadapi bencana	Meningkatnya layanan mitigasi dan penanganan bencana	Persentase penanganan bencana yang sesuai dengan waktu tanggap	BPBD	<i>Smart Society</i>	2024
Pengawasan pelaksanaan kebijakan	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam	Jumlah dokumen potensi kebakaran	BPBD/DAMKAR	<i>Smart Society</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
pengendalian kebakaran	menghadapi kebakaran				
Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Menguatnya kualitas pemahaman dan pengamalan aqidah, syariah, akhlak, tarbiyah, dakwah/syiar Islam dalam masyarakat berdasarkan Alquran dan hadis	Tingginya Indeks Pembangunan Syariah (IPS)	Dinas Syariah Islam	<i>Smart Society</i>	2024
Pengembangan peningkatan pengelolaan Dayah yang mandiri	Meningkatnya jumlah Dayah mandiri yang berstandarisasi	Tingginya indeks kemandirian Dayah dan berstandarisasi	Dinas Pendidikan Dayah	<i>Smart Society</i>	2024
Penyelenggaraan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan aceh selatan	Mewujudkan system penjaminan mutu dalam pencapaian standar pendidikan Aceh Selatan	Persentase regulasi dan pelaporan pencapaian standar pendidikan	MPD	<i>Smart Society</i>	2024
Membuat SOP yang mengacu pada peningkatan, efektifitas, efesiensi pelayanan	Peningkatkan Kwalitas Pelayanan Administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRK	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan keuangan DPRK	Sekretariat DPRK	<i>Smart Society</i>	2023
Mebuat kebijakan tentang penjadwalan kegiatan rapat rapat DPRK	Terfasilitasi Kegiatan Rapat rapat DPRK	Terlaksananya semua agenda rapat rapat DPRK	Sekretariat DPRK	<i>Smart Society</i>	2023

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Percepatan Penurunan angka stunting	Keluarga Beresiko	Menurunnya angka stunting	DP3AKB	<i>Smart Living</i>	2024
Pembentukan Kabupaten Layak Anak	Lintas Sektor	Terpenuhinya Hak-Hak Anak	DP3AKB	<i>Smart Society</i>	2024
Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	peningkatan layanan persampahan	Mempercepat akses pelayanan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Diskominfo	<i>Smart Environment</i>	2024
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan Hidup	pengaduan terhadap masalah lingkungan hidup dan proses Persetujuan Lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis resiko	Mempermudah pengaduan terhadap masalah lingkungan hidup dan proses Persetujuan Lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis resiko	DPMPTSP DLH	<i>Smart Environment</i>	
Penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan	Peningkatan kualitas pelayanan terkait sektor persampahan	Revisi regulasi persampahan	BPKD	<i>Smart Goverment</i>	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Tercapainya 0 % kawasan perumahan permukiman kumuh	Penurunan angka lokasi kawasan perumahan permukiman kumuh	Disperkim	<i>Smart Environmet</i>	

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
	di Kabupaten Aceh Selatan	di 82 desa pada 18 kecamatan di Kabupaten Aceh			
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya	Peningkatan sistem untuk mudah masyarakat untuk medeteksi lokasi dan peta tanah	Dinas Pertanahan	Smart Environment	2024
Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Smart City Aceh Selatan	Peningkatan layanan dan mutu pendidikan	Kualitas layanan dan mutu pendidikan	Disdikbud	Smart Society	2024

4.1.2 Kelembagaan

Kelembagaan adalah bagian penting dalam pelaksanaan Smart City di Kabupaten Aceh Selatan. Dua elemen utama dalam hal ini adalah Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City. Mereka memiliki peran dan tugas sebagai berikut:

a. Dewan Smart City

1. Memberikan arahan strategis untuk pengembangan Smart City sesuai dengan visi dan kebutuhan.
2. Memberikan persetujuan dan dukungan untuk kebijakan dan rencana pengembangan Smart City.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek Smart City.

b. Tim Pelaksana Smart City

1. Mengusulkan program dan kegiatan untuk pengembangan Smart City.
2. Melaksanakan program-program ini dengan mengoordinasikan berbagai sektor dan aspek.
3. Mengikuti arahan dari Dewan Smart City.
4. Merumuskan inovasi dan mengusulkannya kepada Dewan Smart City.
5. Melakukan perencanaan, pengembangan, dan implementasi Smart City secara terkoordinasi dan terpadu di seluruh sektor.
6. Melaporkan kemajuan kepada Dewan Smart City.
7. Mendukung partisipasi pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat.

Pembentukan Dewan Smart City yang melibatkan berbagai pihak telah memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan Smart City yang berkelanjutan. Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, perlu disusun Standard Operating Procedure (SOP) Smart City. SOP ini akan membantu menggerakkan semua elemen yang terlibat. Selain itu, penting juga memperhatikan peran masyarakat sipil dalam Smart City, seperti kerja sama dengan perguruan tinggi dan komunitas yang telah berkontribusi dalam upaya pengembangan Smart City di Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 4.2 Rencana Aksi Pengembangan Kelembagaan Smart City Kabupaten Aceh Selatan

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Pembentukan Tim Pelaksana Rencana Aksi Smart City di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Pelayanan Umum dan Peningkatan Mutu Pendidikan	Terbentuknya Tim Pelaksana	Disdikbud	<i>Smart Society</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Penetapan Regulasi tentang Masterplant Smart City	Tersusunnya Regulasi Masterplant Smart City	Peraturan Bupati	Diskominsa Bagian Hukum Setdakab	<i>Smart Governance</i>	2024
Pembentukan Dewan Smart City Daerah	Dewan Smart City Daerah	Peraturan Bupati	Diskominsa Bagian Hukum Setdakab	<i>Smart Governance</i>	2024
Pembentukan Tim Sekretariat Rencana Aksi Smart City di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Pelayanan Umum dan Peningkatan Mutu Pendidikan	Terbentuknya Tim Sekretariat	Disdikbud	<i>Smart Society</i>	2024
Pembentukan organisasi penanggulangan bencana untuk merumuskan kebijakan kebencanaan	Peningkatan penanganan penanggulangan bencana	Terbentuknya FPRB (forum Pengurangan Risiko Bencana)	BPBD	<i>Smart Society</i>	2024
Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam	Jumlah kasus pelanggaran Syariat Islam yang di Selesaikan	Berkurangnya kasus pelanggaran Syariat Islam	Dinas Syariat Islam	<i>Smart Society</i>	2024
Meningkatkan pengembangan kelembagaan Dayah yang berstandarisasi	Meningkatnya jumlah Dayah yang telah terakreditasi	Terakritisasinya seluruh Dayah-dayah di wilayah Kabupaten Aceh Selatan	Dinas Pendidikan Dayah	<i>Smart Society</i>	2024
Penyusunan kurikulum aceh	Tersusunnya kurikulum	Jumlah kurikulum	MPD	<i>Smart Society</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
selatan yang islami untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah	aceh selatan yang islami untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah	aceh selatan yang islami untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang tersusun			
Mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan pada staf sekretariat DPRK	Mningkatnya SDM	Terlaksananya agenda kegiatan DPRK	Sekretariat DPRK	<i>Smart Society</i>	2023
PerBup UPTD	Pelayanan Masyarakat	Tertanganinya kasus pengaduan	DP3AKB	<i>Smart Society</i>	2024
Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP)	Peningkatan Pelayanan Yang Lebih Efektif dan Efisien	DED Mall Pelayanan	BAPPEDA, PUPR	<i>Smart Governance</i>	2024-2026
Optimalisasi Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Peningkatan Keamanan Data Instansi Pemerintah	Jumlah Koneksi Jaringan antar OPD	Diskominsa	<i>Smart Governance</i>	2024-2026
Pengembangan Data Center	Jumlah Pusat Data yang Dikelola	Sertifikasi Data Center	Diskominsa Balitbang Bappeda	<i>Smart Governance</i>	2024-2026
Pengembangan Jaringan Komputer yang Terkoneksi Internet	Jumlah OPD yang telah memiliki Jaringan Internet	36 OPD 18 Kecamatan	Diskominsa	<i>Smart Governance</i>	2024-2026
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan.	Tingginya kualitas bibit ternak yang dihasilkan	Tingginya angka kelahiran dari	Dinas Pertanian	<i>Smart Economy</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
	dari program inseminasi buatan	hasil program inseminasi buatan			
Pembentukan Tim Perencanaan Pembangunan lanjutan rumah sakit regional	Peningkatan Pelayanan Publik	Tim Teknis RSUDYA	Dinas Kesehatan, RSUDYA	<i>Smart Living</i>	2024
Pembentukan Tim pelayanan kesehatan telemedecine	Peningkatan pelayanan kesehatan	Tim pelayanan kesehatan medecine	Dinas Kesehatan, RSUDYA	<i>Smart Living</i>	2024
Pembentukan Tim Teknis BLU-e	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Pelayanan lebih cepat, efisien dan transparan	Dinas Perhubungan	<i>Smart living</i>	2024
Pembentukan Tim Pelaksana Rencana Aksi Smart City di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Pelayanan Umum dan Peningkatan Mutu Pendidikan	Terbentuknya Tim Pelaksana	Disdikbud	<i>Smart Society</i>	2024
Pembentukan Tim Sekretariat Rencana Aksi Smart City di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Pelayanan Umum dan Peningkatan Mutu Pendidikan	Terbentuknya Tim Sekretariat	Disdikbud	<i>Smart Society</i>	2024
Pembentukan organisasi penanggulangan bencana untuk merumuskan kebijakan kebencanaan	Peningkatan penanganan penanggulangan bencana	Terbentuknya FPRB (forum Pengurangan Risiko Bencana)	BPBD	<i>Smart Society</i>	2024
Penguatan, Pengembangan,	Jumlah kasus pelanggaran	Berkurangnya	Dinas Syariat Islam	<i>Smart Society</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam	Syariat Islam yang di Selesaikan	kasus pelanggaran Syariat Islam			
Meningkatkan pengembangan kelembagaan Dayah yang berstandarisasi	Meningkatnya jumlah Dayah yang telah terakreditasi	Terakreditasinya seluruh Dayah-dayah di wilayah Kabupaten Aceh Selatan	Dinas Pendidikan Dayah	<i>Smart Society</i>	2024
Penyusunan kurikulum aceh selatan yang islami untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah	Tersusunanya kurikulum aceh selatan yang islami untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Jumlah kurikulum aceh selatan yang islami untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang tersusun	MPD	<i>Smart Society</i>	2024
Mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan pada staf sekretariat DPRK	Mningkatnya SDM	Terlaksananya agenda kegiatan DPRK	Sekretariat DPRK	<i>Smart Society</i>	2023
Pembentukan organisasi sebagai pelaksana kabupaten	Peningkatan kualitas layanan publik	Terbentuknya Tim teknis pelaksana TIK (Teknologi informasi dan komunikasi)	Diskominfo	<i>Smart Government</i>	2024
Pembangunan Data Center	Peningkatan kualitas	Pembuatan DED	Dinas PUPR	<i>Smart</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
terintegrasi	layanan data yang terintegrasi	gedung data Center		Environment	

4.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City

Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Aceh Selatan sangat baik dan mencakup seluruh wilayah kabupaten. Jaringan ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu kabel serat optik (Fiber Optic/FO) dan jaringan nirkabel. Jangkauan internet telah meliputi seluruh wilayah, bahkan hingga ke tingkat gampong, memastikan akses internet yang merata bagi seluruh penduduk.

Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten ini sudah terhubung menggunakan kabel serat optik (FO), yang menyediakan koneksi internet dengan kecepatan dan keandalan tinggi. Namun, masih ada beberapa gampong yang belum terhubung dengan infrastruktur kabel FO.

Server-server yang digunakan dalam operasional pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan tersebar di beberapa SKPD. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengonsolidasikan server-server ini secara terpusat di bawah wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO). Dengan demikian, pengelolaan data dan aplikasi pemerintahan akan lebih efisien, dan koordinasi antara SKPD dapat ditingkatkan.

Kabupaten Aceh Selatan memiliki infrastruktur pendukung yang kuat untuk mengimplementasikan inisiatif Smart City. Dengan akses internet yang merata dan rencana pengkonsolidasian server, kabupaten ini memiliki fondasi yang solid untuk mengembangkan layanan dan solusi cerdas yang dapat meningkatkan kehidupan warga serta efisiensi operasional pemerintahan.

Tabel 4.3 Infrastruktur Pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Ya/ Tidak	Interpretasi
1.	Ketersediaan Jaringan 4G/3G	Ya	Baik
2.	Ketersediaan Broadband Acces	Ya	Baik
3.	Akses Internet Terpusat (didistribusikan)	Tidak	-
4.	Jaringan Antar SKPK (Intra Instansi pemerintah)	Ya	Cukup
5.	Ketersediaan Hotspot untuk internal Pemerintah dan untuk Publik	Ya	Baik
6.	Data Center Pemerintah	NA	Baik
7.	Data Center Recovery Pemerintah	Tidak	-

4.3 Rencana Pengembangan Aplikasi Dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City

Kabupaten Aceh Selatan, telah mengimplementasikan berbagai layanan aplikasi yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan pemerintahan. Namun, semua aplikasi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tersebut, belum diintegrasikan dalam satu portal digital yang terkelola dengan baik, sehingga proses kemudahan akses dan dokumentasi masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hingga saat penulisan buku ini, sudah ada belasan aplikasi yang berhasil direalisasikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Jumlah ini diperbarui setidaknya setiap tahun melalui survei yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Selatan.

Penting untuk dicatat bahwa pengembangan atau pengadaan aplikasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan belum semuanya mengikuti metodologi System Development Life

Cycle (SDLC) secara menyeluruh. Proses pengembangan aplikasi memerlukan beberapa tahapan, termasuk:

1. Penerjemahan Kebutuhan Bisnis: Mengubah kebutuhan bisnis menjadi spesifikasi desain yang lebih terinci.
2. Desain Aplikasi: Beberapa aplikasi memiliki desain yang rinci, termasuk diagram aliran data (data flow), diagram relasi entitas, dan pengendalian aplikasi yang memastikan pemrosesan yang akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi, dan dapat diaudit, serta keamanan aplikasi yang memastikan kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas data.
3. Implementasi: Mengubah desain teknis menjadi kode program (coding).
4. Penjaminan Mutu: Melakukan uji coba yang mencakup uji unit, uji sistem, uji integrasi, dan Uji Penerimaan Pengguna (User Acceptance Test/UAT).
5. Instalasi dan Penilaian Mutu: Melakukan pemasangan dan penilaian mutu aplikasi.

Penting juga untuk mencatat bahwa setiap aplikasi yang diimplementasikan di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan harus disertai dengan dokumentasi lengkap dari seluruh tahap SDLC, manual pengguna, operasi, dukungan teknis, dan administrasi, serta materi transfer pengetahuan dan pelatihan bagi pengguna dan administrator sistem.

Namun, meskipun telah ada upaya yang signifikan dalam pengembangan aplikasi pemerintah, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Beberapa sistem informasi terpisah dan tidak terintegrasi dengan baik, dan beberapa dibangun menggunakan teknologi tertutup (closed-source) dan skema database yang tidak standar, yang menghambat integrasi dengan sistem lain. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kerangka kerja (framework) dan aplikasi yang memungkinkan interoperabilitas antara sistem informasi di berbagai SKPD, sehingga pengelolaan informasi bisa lebih efisien dan efektif.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mencapai manfaat yang lebih besar dari sistem informasi yang sedang dikembangkan atau sudah berjalan. Integrasi data dari berbagai sumber informasi yang beragam, baik dalam hal perangkat lunak, perangkat keras, atau format data, dapat dilakukan tanpa mengubah seluruh sistem yang ada atau membangun aplikasi pusat yang mahal.

Tabel 4.4 Rencana Aksi Pengembangan Aplikasi Pendukung

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	SKPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Pengembangan Aceh Selatan Integrated Smart Tourism and Seaport (Pelabuhan dan Wisata Cerdas Terintegrasi)	Mengembangkan Pesona Aceh Selatan Sebagai Destinasi Wisata Budaya	Qanun Kepariwisataaan	PARIWISATA	<i>Smart Branding</i>	2024
Pembangunan lanjutan rumah sakit regional	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pembangunan ruang MOT	RSUDYA	<i>Smart Living</i>	2024
Peningkatan Pelayanan Kesehatan telemedecine	Pelayanan spesialisik (anak dan kebidanan) di FKTP I melalui konsultasi Jarak Jauh	Tersedia dan berfungsinya sarana pelayanan telemedecine	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	<i>Smart living</i>	2024
Optimalisai jaringan telekomunikasi Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Akses pelayanan PSC yang cepat dan terintegrasi dengan Rumah Sakit	Berfungsinya aplikasi SPGDT	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	<i>Smart living</i>	2024
Pembangunan Jaringan Mobilitas Transfortasi berbasis CCTV	Mengurangi tingkat kejahatan	Perencanaan Jaringan Data Center	Dinas Perhubungan	<i>Smart living</i>	2024
Pengembangan piranti pengintegrasian data pendidikan dan kebudayaan di Aceh Selatan	Terintegrasinya data pendidikan dan kebudayaan	Tersedianya data terpilah	Disdikbud	<i>Smart Society</i>	2024

Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Indikator Keberhasilan	SKPD Penanggung Jawab	Dimensi	Tahun
Optimalisasi pemanfaatan jaringan telekomunikasi	Peningkatan integrasi layanan data pendidikan	Jumlah pengguna akses data pendidikan	Disdikbud	<i>Smart Society</i>	2024
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Pemulihan kawasan dampak bencana	Peningkatan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana	BPBD	<i>Smart Society</i>	2024
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sub Kegiatan Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya	Dinas Syariat Islam	<i>Smart Society</i>	2024
Meningkatkan pembangunan infrastruktur di Dayah-dayah	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendukung di Dayah	Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas di Dayah	Dinas Pendidikan Dayah	<i>Smart Society</i>	2024
Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor	MPD	<i>Smart Society</i>	2024
Membuat web untuk menampung aspirasi tuk disampaikan kepada Dewan	Tertampungnya semua aspirasi masyarakat	Aspirasi masyarakat dapat ditanggapi anggota dewan	Sekretariat DPRK	<i>Smart Society</i>	2023

Tabel 4 5 Layanan Aplikasi Yang Digunakan pada OPD Kabupaten Aceh Selatan

No	Sektor	Daftar Aplikasi
1	Pendidikan	Dapodik

No	Sektor	Daftar Aplikasi
		Dapobud
2	Kesehatan	SIKDA Generik (Sistem Informasi Kesehatan Daerah)
		Aspak (Aplikasi Sarana Prasarana Kesehatan)
		SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)
3	Sumber Daya Manusia	SAPK BKN
		SIUDIN
		IPPNS BKN
		e-Lapkin
		SIPINTER
		SIMPEG
4	Tenaga Kerja Info Kerja	Portal infokerja.naker.go.id
5	Sekretaris DAerah	SPSE V 4.3
		SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
6	Komunikasi dan Informatika	SiMAYA
		Portal Layanan
		PPID
7	Pengelola Keuangan Daerah	E-Catalog
		Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM-GAJI)
		Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) DANA DESA
		Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) DAK FISIK
		SIP PBB
8	Perpustakaan	SIKN
9	Inspektorat	SIM-HP
		SIPTL
10	Administrasi Legislasi	JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)

No	Sektor	Daftar Aplikasi
	Manajemen Kepegawaian	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) https://sapk.bkn.go.id
		Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) Pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
		Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI)
		Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN)
		Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN)

4.4 Sinkronisasi Program RPJMD Dengan Program Kerja Inovasi Smart City

4.4.1 Smart Governance

Tabel 4.6 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Governance

Misi 1 Smart City : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien Inovatif
Mendukung Misi RPD :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan nilai-nilai Syariat Islam dan budaya dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat 2. Penyederhanaan sitem pelayanan Birokrasi Pemerinttahan
Tujuan RPD :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan Masyarakat. 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas.

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart Ci ty	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaa n	Anggara n	Penanggun g Jawab	Mitra	Tahu n
		Membangun Sarana dan Prasarana untuk layanan pengaduan	sarana pengaduan yang terintegrasi	Peningkatan jumlah tindak lanjut permasalahan masyarakat	APBK	200 Juta	Bagian Organisasi Setdakab Aceh Selatan,		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Patroli Rutin	Penanganan Gangguan Keteriban umum dan Ketentraman masyarakat serta pelanggaran Qanun Syariat Islam	Berkurangnya Pelanggaran Perda dan Qanun Syariat Islam	APBK	150 Juta	Satpol PP dan WH, Dinas Syariat Islam, MPU	Polri, TNI, Mahkamah Syariah, MPU	2024
		Konsultasi	Klinik Konsultasi Berliterasi	Semakin efektif, efisien dan terukurnya penyelenggaraan Pemerintahan	APBK	120 Juta	Inspektorat		2024
		Kepegawaian Daerah	Pengembangan kualitas pelayanan Kepegawaian	Sarana Akses pelayanan kepegawaian	APBK	500 Juta	BKPSDM	BKN Kanreg XIII	2024
		Sosialisasi	Memonitoring pendakalan akidah	Meminimalisir pelanggaran syariat di kalangan masyarakat	APBK	150 Juta	MPU, Dinas Syariat Islam, Satpol PP & WH	Satpol PP & WH, Mahkamah Syariah	2024

4.4.2 Smart Branding

Tabel 4.7 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Branding

Misi 1 Smart City : Mewujudkan pembangunan seluruh sektor yang berorientasi bisnis sekaligus meningkatkan nilai-nilai kedaerahan
Mendukung Misi RPD : 1. Penguatan Basis Produksi Masyarakat dalam Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 2. Mewujudkan Terbangunnya Sentra-Sentra Produksi, dan Industri Kreatif yang Kompetitif
Tujuan RPD : Meningkatkan produktifitas sektor unggulan daerah dan menurunkan tingkat pengangguran

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	-Fasilitasi Ketersediaan Teknologi Budidaya, Sarana Prasarana Dan Permodalan Untuk Usaha Budidaya, Panen Dan Pasca Panen	Tersedia Intensifikasi, Ekstensifikasi Dan Berfungsinya Teknologi Pertanian	DAK, DOKA APBK	3.344.750.000	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan Dinas Dakprindakop	Distanbun Aceh, Kementan, Pt.Pertani, Pt. Sanghiyang Sri, Pt. Rutan, Pt. Yanmar, Pt. Kubota	2024-2026
			- Pengelolaan Sumber Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan Dan Mikroorganisme	Tingginya Angka Kelahiran Dari Hasil Program		0	Dinas Pertanian	Disnak Aceh, BPTU HPT Indrapuri, Balai Veteriner Medan,	2024-2026

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
				Inseminasi Buatan					
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Peningkatan Kualitas Dari UMKM Dan Koperasi Yang Ada	Tersedianya Modal Usaha Dan Akuntabilitas Keuangan	APBK	2.228.505.091	Dinas Dagperinkop UKM	Dinas Koperasi Dan UKM Aceh, Dinas Perindakop Aceh, Balai Diklat Industri	2024-2026

4.4.3 Smart Economy

Tabel 4.8 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Economy

Misi 1 Smart City: Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek sosio ekonomi , sosiokultur, dan adaptif
Mendukung Misi RPD:
Tujuan RPD: Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang pertanian.

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	APBK	1.273.470.900	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	APBK	50.000.400	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	APBK	3.493.327.200	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
				Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan	APBK	1.022.034.000	Dinas Pertanian Tanaman		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
				dipelihara			Pangan dan Hortikultura		
				Jumlah Dam Parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	APBK	648.719.900	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
				Jumlah Embung yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	APBK	324.360.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
				Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan dipelihara	APBK	675.016.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	APBK	101.122.250	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
		Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	APBK	509.008.970	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	APBK	168.990.500	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	APBK	40.499.500	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
				Jumlah Sekolah Lapang Kelompok tani tingkat yang terbentuk dan beroperasi	APBK	90.059.500	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		2024
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	APBK	2.920.608.302	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024
				Jumlah Dokumen administrasi dan operasional perkantoran	APBK	30.625.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pengawasan Perikanan dan Kawasan Budidaya Ikan	APBK	10.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	APBK	30.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024
				Bertambahnya Jumlah Sarana Penangkapan Ikan	APBK	605.999.999	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024
				Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Petani Pembudidaya	APBK	80.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Perikanan Budidaya	APBK	560.649.999	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Mewujudkan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Hasil Perikanan	Bertambahnya Unit Pengelolaan Ikan (UPI)	APBK	30.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024
				Jumlah Kemitraan yang berhasil dibentuk	APBK	202.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024
				Meningkatnya Persentase Produksi Ikan yang Dipasarkan Keluar Daerah			Dinas Kelautan dan Perikanan		2024
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pemberian Rekomendasi BBM Bersubsidi kepada Nelayan	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	APBK	10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		2024

4.4.4 Smart Living

Tabel 4.9 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Living

Misi 1 Smart City :
Mendukung Misi RPD : 1. Memastikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas serta santunan publik dan integrasi 2. Penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan
Tujuan RPD : 1. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan rujukan 2. Mewujudkan manusia yang berakhlak, berkualitas dan sejahtera 3. Meningkatkan pelayanan jasa transportasi dan perhubungan

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Pengembangan Rumah Sakit	Lanjutan Pembangunan Ruang	Jumlah pembangunan ruang MOT	DAK	5.5 M	RSUD dr.H.Yulidin Away	-	2024
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan telemedecine	Peraturan daerah	DAK	5.182.940.000	Dinas Kesehatan	RSUD YA	2024
			Pembentukan Tim pelayanan kesehatan telemedecine	Tim pelayanan kesehatan medecine					
			Penyediaan sarana prasarana Peningkatan Pelayanan Kesehatan telemedecine	Tersedia dan berfungsinya sarana pelayanan telemedecine					

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Optimalisasi jaringan telekomunikasi	Tersedia dan berfungsinya aplikasi SPGDT	APBD	355.740.000	Dinas Kesehatan	RSUD YA	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pembentukan Tim Teknis BLU-e (Bukti Lulus Uji Elektronik)	Pelayanan lebih cepat, efisien dan transparan	APBK	Rp. 115.000.000	Dinas Perhubungan		2024

4.4.5 Smart Society

Tabel 4.10 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Society

Misi 1 Smart City: Mewujudkan masyarakat yang edukatif , islami, berkualitas, maju dan berkeadilan.
Mendukung Misi RPD: Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan
Tujuan RPD: Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program pemberdayaan sosial	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Persentase ppks yang memperoleh bantuan sosial	Apbk	900.000.0000,-	Dinsos		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program rehabilitasi sosial	Penyediaan permakanaan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Apbk	546.216.045,-	Dinsos		2024

Misi 1 Smart City: Mewujudkan masyarakat yang **edukatif**, islami, berkualitas, maju dan berkeadilan.

Mendukung Misi RPD: Menentukan kebijakan terkait peningkatan mutu pendidikan

Tujuan RPD: Terwujudnya Peningkatan Mutu Pendidikan

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program penyelenggaraan majelis pendidikan aceh	Penyelenggaraan kebijakan pendidikan aceh	Terselenggaranya kebijakan pendidikan aceh	Apbk	76.967.792	Mpd Aceh Selatan	-	2024
			Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Terselenggaranya Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	APBK	66.758.627	MPD Aceh Selatan	-	2024
			Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terselenggaranya pelatihan bagi Pendidik dan	APBK	30.492.782	MPD Aceh Selatan	-	2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
			Pendidikan Aceh	Tenaga Kependidikan					
			Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Terselenggarannya Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	APBK	95.976.261	MPD Aceh Selatan	-	2024

Misi 1 Smart City: Mewujudkan masyarakat yang **edukatif**, islami, berkualitas, maju dan berkeadilan.

Mendukung Misi RPD: Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas dan Berkeadilan

Tujuan RPD: Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkeadilan

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Program peningkatan kualitas keluarga	Kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (kg) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/ kota	Persentase keluarga yang sudah mendapat pelayanan konseling keluarga	APBK	14,101,620	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana	-	2024
			Kegiatan Penyediaan Layanan bagi	Cakupan pusat pembelajaran	APBK	14,622,346	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	-	2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
			Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	keluarga di Kabupaten			Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
		Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	DAK	3,931,998,540	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana	Puskesmas dan Bidan Desa	2024
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK	977,389,460	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Puskesmas dan Bidan Desa	2024

Misi 1 Smart City: Mewujudkan masyarakat yang edukatif , islami, berkualitas, maju dan berkeadilan.
Mendukung Misi RPD: Mewujudkan masyarakat yang edukatif dan Maju
Tujuan RPD: Terwujudnya masyarakat yang edukatif dan Maju

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Penataan desa	Penyelenggaraan penataan desa	Terfasilitasinya sarana dan prasarana desa	APBD	300.000.000	Dpmg		2024
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	APBD	150.000.000	DPMG		2024
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	APBD	80.000.000	DPMG		2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
			dan Masyarakat Hukum Adat	dan Masyarakat Hukum Ada					
		Program administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	APBD	500.000.000	Dpmsg		

Misi 1 Smart City: Mewujudkan masyarakat yang **edukatif**, islami, berkualitas, maju dan berkeadilan.

Mendukung Misi RPD: Menegakkan aturan Syariat Islam.

Tujuan RPD: Terwujudnya Kehidupan Sosial Politik dan Keagamaan yang Harmoni serta Menegakkan Aturan Syariat Islam.

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Patroli siaga ketentraman masyarakat dan ketertiban Umum	APBK	431.540.400	Satpol PP WH		2023
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	APBK	50.003.900	Satpol PP WH		2023

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
			Pengawasan terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Persentase Penegakan Qanun Syariat Islam	APBK	212.723.100	Satpol PP WH		2023
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas Gampong yang aktif	APBK	128.220.300	Satpol PP WH		2023

Misi 5 Smart City: Mewujudkan masyarakat yang edukatif, islami, berkualitas, maju dan berkeadilan
Mendukung Misi RPJMD: Terwujudnya Peningkatan Kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat
Tujuan RPJMD: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan	Peningkatan dan pengembangan peran dan fungsi lembaga perpustakaan melalui kebijakan daerah	Program Pembinaan Perpustakaan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perpustakaan	Jumlah Dokumen Kebijakan (Qanun Perpustakaan, Master Plan Pengembangan Perpustakaan, Road Map Pengembangan Perpustakaan)	APBK	350.000.000,00	Dispusip, Bappeda	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Disdikbud, MPD, Dispusip Aceh	2024-2026

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Program Pembinaan Perpustakaan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	1. Jumlah perpustakaan yang dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021); 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas dalam rangka penyelenggaraan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial (Perperpusnas 3/2023, Qanun Aceh ttg Perpustakaan).	APBK, DAK, DOKA, CSR		Dispusip	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Sekretariat Kecamatan, Dispusip Aceh, Perpustakaan, Perusahaan di Wilayah Aceh Selatan	2027-2031

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab	Mitra	Tahun
Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Program Pembinaan Perpustakaan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	APBK	50 juta / tahun	Dispusip	Dispusip Aceh	2024 dan seterusnya
Meningkatkan perlindungan naskah kuno dalam rangka melestarikan kekayaan informasi sejarah, ilmu pengetahuan, budaya dan bangsa.	Menyelamatkan nilai informasi dan fisik naskah kuno agar dapat digunakan dalam waktu yang lama	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	Perlindungan dan pelestarian naskah kuno (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)	1. Persentase Naskah Kuno Yang Terawat; 2. Persentase Naskah Kuno Yang diakuisisi	APBK	50 juta / tahun	Dispusip	Dispusip, Sekretariat Kecamatan, Dispusip Aceh	2024 dan seterusnya

4.4.6 Smart Environment

Tabel 4.11 Sinkronisasi Program RPJMD dengan Program Kerja Inovasi Smart Environment

Misi 1 Smart City : Mewujudkan daerah yang ramah lingkungan dalam proses pembangunan berkelanjutan
Mendukung Misi RPD : Misi- 5. Penyederhanaan sistem pelayanan Birokrasi Pemerintahan 6. Penyediaan Infrastuktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan
Tujuan RPD : 1. Meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan kebijakan lingkungan hidup 3. Mewujudkan penataan Ruang wilayah yang selaras dan terintegrasi

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab
Pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH)	Peningkatan sistem untuk mudah masayarkat untukmedete ksi lokasi dan peta tanah	APBK	165.000.000	Dinas Pertanahan	Dinas Pertanahan Aceh dan Dinas Komimfo Kabupaten Aceh Selatan	2024
Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Penurunan angka lokasi kawasan perumahan permukiman kumuh di 82 desa pada 18 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan	APBK	480.000.000	Dinas PERKIM	Bappeda dan Setdakab Aceh Selatan	2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab
Pengelolaan Persampahan	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kecepatan akses dalam memperluas pelayanan persampahan	APBK	950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Diskomimfo, PUPR,	2024
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyusunan dan Penetapan Dokumen RPPLH	Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten	APBK	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Distan, DKP, Dispar, Lembaga Pendidikan Unsyiah	2024
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	- Sistem pemantauan kualitas air secara online dan realtime. - Mempermudah pengujian parameter kualitas lingkungan	APBK	630.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo, DPMPTSP	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung diwilayah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Data Centre Terintegrasi	DED Data Centre	APBD	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Diskominfo Aceh Selatan	2024
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Baik Fungsi	Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP)	DED Mall Pelayanan	APBD	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPMPTSP	2024

Tujuan Smart City	Sasaran Smart City	Program	Kegiatan Smart City	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Anggaran	Penanggung Jawab
Bangunan Gedung							

V. Peta Jalan Pembangunan Smart City

Pada bagian ini akan menjelaskan peta jalan (*road map*) implementasi program pembangunan *Smart City* merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mewujudkan rencana induk (*master plan*) *Smart City* menjadi pelaksanaan pembangunan. Peta jalan (*road map*) pengembangan *Smart City* terbagi dalam 3 (tiga) fase yaitu:

1. Pengembangan Jangka Pendek. Perencanaan pengembangan *Smart City* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan periode yang dimulai dari 2021 sampai 2022.
2. Pengembangan Jangka Menengah. Perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, pada periode 2021 sampai tahun 2025.
3. Pengembangan Jangka Panjang. Perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan, pada periode 2021 sampai tahun 2031

Selanjutnya pada sub bab selanjutnya akan digambarkan secara detail strategi yang akan digunakan, program/inovasi, anggaran yang dibutuhkan, pelaksana kegiatan, dimensi yang termuat dalam *Smart City*, indikator keberhasilan dari program yang dijalankan dan target capaian untuk masing-masing periode yakni fase program jangka pendek, fase program jangka menengah dan fase program jangka panjang. Pada bagian akhir *road map* pengembangan *Smart City* Kabupaten Aceh Selatan juga akan disebutkan program kegiatan Quick Win pada fase jangka pendek 2021-2022. Program *Quick Win* akan memuat semua sub dimensi pada dimensi *Smart City*.

5.1 Fase Program Jangka Pendek (Tahun 2021-2022)

Tabel 5 1 Fase Program Jangka Pendek (Tahun 2021-2022)

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian	
							2021	2022
1	Integrasi layanan terutama <i>government to citizen</i> dan <i>government to business</i> serta juga <i>government to government</i> dan <i>government to employee</i> untuk meningkatkan kinerja ASN serta menuju ke Satu Data	Penelitian dan Pengkajian (naskah akademik qanun)	150.000.000	BAPPEDA, Diskominfo, Sekretariat	<i>Smart Governance</i>	Naskah akademik untuk penyusunan qanun satu data		√
2	Pengembangan aplikasi publik yang <i>user friendly</i>	Kegiatan Penelitian dan Pengkajian	100.000.000	Diskominfo	<i>Smart Governance</i>	Jumlah Masukan dan Usulan dari masyarakat dalam bentuk ikut serta lomaba/sayembara		√
3	Penerapan layanan dokumentasi dan informasi hukum	Penguatan Implementasi PPID di setiap OPD	200.000.000	Seluruh SKPD	<i>Smart Governance</i>	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan PPID		√
4	Penerapan Rencana Induk SPBE Aceh Selatan	Penerapan Rencana Induk SPBE Aceh Selatan	400.000.000	Diskominfo, Sekretariat Daerah	<i>Smart Governance</i>	Indeks SPBE Meningkat		√
5	Pembangunan dan perawatan infrastruktur pendukung budaya, wisata islami dan kebencanaan	Renovasi dan Perawatan Hutan Aceh Selatan	400.000.000	Dinas Pariwisata	<i>Smart Branding</i>	Tahun Renovasi dan Perawatan		√
6	Pembangunan Aceh Selatan E-Commerce yang terintegrasi dengan <i>dashboard</i> Aceh Selatan <i>Command Center</i> (ACTT)	Membuat aplikasi e-UMKM Aceh Selatan	100.000.000	Diskominfo	<i>Smart Economy</i>	Tahun Pengembangan		√

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian	
							2021	2022
7	Pembuatan papan informasi nilai sejarah pada bangunan-bangunan kota pusaka Aceh Selatan	Pengembangan <i>Display</i> Informasi Sejarah	300.000.000	Disdikbud	<i>Smart Economy</i>	Tahun Pengembangan		√
8	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	600.000.000	Dinas PUPR, DLHK3	<i>Smart Living</i>	Jumlah Kecamatan yang dibangun prasarana dan Sarana Air Limbah		√
9	Pengembangan program yang mengarah pada perbaikan kesehatan masyarakat	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Gampong Sehat	500.000.000	DINKES, Gampong, BPMG	<i>Smart Living</i>	Jumlah Gampong Sehat		√
10	Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik	Pembuatan Peraturan Walikota tentang kebutuhan kelompok Disabilitas di ruang publik	20.000.000	Dinas Sosial, Bagian Hukum Sekretariat Daerah	<i>Smart Living</i>	Terbitnya Peraturan Walikota		√
11	Penguatan peran ulama dan masyarakat pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah	Peningkatan kegiatan Safari Dakwah Safari Subuh, Safari Ramadhan	100.000.000	MPU Aceh Selatan, Dinas Syariah Islam	<i>Smart Society</i>	Jumlah kunjungan ke Mesjid		√
		Lomba membaca kitab Jawi/kuning	300.000.000	MPU Langsa, DSI, Kemenag Langsa	<i>Smart Society</i>	Jumlah peserta yang ikut serta		√

5.2 Fase Program Jangka Menengah (2021-2026)

Tabel 5.2 Fase Program Jangka Menengah (Tahun 2021-2025)

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian				
							2021	2022	2023	2024	2025
1	Peningkatan kualitas layanan publik	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Masyarakat (SIPBM) – <i>pilot project</i>	400.000.000	Diskominfo	<i>Smart Governance</i>	Tahun Pengembangan					√
		Pembuatan Aplikasi kalender perencanaan penyusunan RPJMG dan RKPG di Gampong	400.000.000	Diskominfo	<i>Smart Governance</i>						√
2	Penerapan layanan yang memenuhi indek Keamanan Informasi (KAMI)	Penelitian dan Pengkajian	500.000.000	Diskominfo	<i>Smart Governance</i>	Tahun Penerapan				√	
3	Pengembangan informasi wisata digital	Aplikasi Wisata Digital Aceh Selatan	400.000.000	Diskominfo	<i>Smart Branding</i>	Tahun Pengembangan				√	
4	Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Memberikan akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di pedesaan	800.000.000	Disperindagkop	<i>Smart Economy</i>	Jumlah UMKM yang mendapat akses pemodalan				√	
5	Membangun ekonomi industri yang berdaya saing dengan memperkuat perekonomian	Pembuatan Peta Potensi Daerah	650.000.000	Diskominfo, Dinas Pariwisata, Bag Ekonomi Setda Aceh Selatan, Disperindagkop	<i>Smart Economy</i>	Tahun Pengembangan			√		

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian					
							2021	2022	2023	2024	2025	
	daerah berbasis pada sektor unggulan daerah dan pengembangan usaha mikro.											
6	Membangun dan mengembangkan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan, sebagai pendukung Smart City.	Membentuk Forum Industri Unggulan	550.000.000	Disperindagkop, Bag. Ekonomi Sekretariat Daerah Aceh Selatan, SKPD terkait pengembangan kewirausahaan	Smart Economy	Banyaknya forum industri yang terbentuk			√			
		Membuat Pelatihan Industri Kecil Produk Unggulan	650.000.000	Disperindagkop, Bag. Ekonomi Sekretariat Daerah Aceh Selatan, SKPD terkait pengembangan kewirausahaan	Smart Economy	Banyaknya peserta yang ikut serta				√		
7	Pengembangan rencana kawasan di masa depan dengan desain terpadu dan berwawasan lingkungan.	Kegiatan mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Sosialisasi Dampak Penyedotan air tanah, galian C	1.200.000.000	Dinas PUPR, DLHK3, Kecamatan, BPPD	Smart Living	Jumlah Panjang Tanggul/Sungai Yang Dibangun				√		
8	Pengembangan sistem Pelayanan kesehatan terpadu dari	Aplikasi Posyandu Terintegrasi	600.000.000	Dinas Kesehatan, Gampong, BPMG	Smart Living	Tahun Pengembangan			√			

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian				
							2021	2022	2023	2024	2025
	puskesmas, bidan, rumah sakit dan dokter praktek yang terintegrasi dan ramah anak.										
9	Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik	Program Penyediaan Akses untuk Penyandang Disabilitas Oleh SKPD	1.000.000.000	Dinas Sosial, Dinas PUPR, SKPD terkait lainnya	<i>Smart Living</i>	Jumlah SKPD yang menyediakan fasilitas akses untuk penyandang Disabilitas				√	
10	Pengembangan sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan transportasi <i>non-motorized</i>	Penyediaan CCTV	800.000.000	Dinas Perhubungan	<i>Smart Living</i>	Tahun Pengembangan				√	
11	Penguatan peran ulama dan masyarakat pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah	Pembuatan modul standar pembinaan Pra Nikah	400.000.000	DP3AP2KB, Dinkes, MPU Aceh Selatan, Kemenag Aceh Selatan	<i>Smart Living</i>	Tahun Pengembangan			√		
12	Penguatan peran ulama dan masyarakat	Peningkatan kegiatan pencegahan	400.000.000	MPU, DSI dan Dayah, Kesbangpol (Forum	<i>Smart Society</i>	Jumlah Kegiatan			√		

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian				
							2021	2022	2023	2024	2025
	pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah	pendangkalan aqidah		Kerukunan Umat Beragama - (FKUB)							

5.3 Fase Program Jangka Panjang (2021-2031)

Tabel 5.3 Fase Program Jangka Panjang (Tahun 2021-2031)

No	Strategi	Program/Inovasi	Anggaran (Rupiah)	Pelaksana/Mitra	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Target Capaian
1	Pengoptimalan kinerja pengawasan internal	Penerapan secara menyeluruh tunjangan kinerja yang didukung dengan sistem e-kinerja	800.000.000	Inspektorat, Sekretriari Daerah	<i>Smart Governance</i>	Tahun Pengembangan	2021-2031
2	Pelayanan terpadu 1 (satu) atap yang melibatkan semua SKPD, Kepolisian dan <i>stakeholder</i>	Aplikasi Pencatatan Kelahiran dan Pembuatan Kartu Identitas Anak	700.000.000	Seluruh SKPD	<i>Smart Governance</i>	Tahun Pengembangan	2021-2031
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata	Program eko-Wisata Ilmu kopi (<i>Augmented Virtual Reality</i>)	600.000.000	Diskominfo, Universitas Samudera Langsa	<i>Smart Branding</i>	Tahun Pengembangan	2021-2031
4	Pengembangan taman kota yang nyaman, aman dan layak bagi anak, pemuda dan lansia.	Pengembangan Taman Kota Ramah Anak	1.200.000.000	Dinas PUPR, Dinas DLHKP, Disporapar, DP3AP2KB	<i>Smart Economy</i>	Tahun Pengembangan	2021-2031
5	Meningkatkan iklim Investasi.	Membentuk forum Investor Fasilitasi untuk pameran produk	1.000.000.000	Disperindagkop	<i>Smart Economy</i>		2021-2031
6	Pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang.	Kegiatan Pembangunan Jalan	20.000.000.000	Dinas PUPR, Bagian Administrasi Pembangunan, Kecamatan	<i>Smart Living</i>	Jumlah Panjang Jalan Yang Dilakukan Peningkatan (Per Tahun)	2021-2031
7	Pengembangan sistem transportasi umum yang	Pembuatan Sistem Pengendalian	1.000.000.000	Dinas Perhubungan,	<i>Smart Living</i>	Tahun Pengembangan	2021-2031

	ramah lingkungan dan terintegrasi dengan transportasi <i>non-motorized</i>	Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya		Pengguna Angkutan			
8	Peningkatan Pembangunan Zona Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Pembangunan Taman Layak Anak Lalu Lintas	2.000.000.000	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR	<i>Smart Living</i>	Tahun Pembangunan	2021-2031

5.4 Quick Win

Dalam jangka pendek di tahun 2021-2022, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menetapkan program *Quick Respons Indonesia Standar (QRIS) pada Objek Wisata* Aceh Selatan sebagai kegiatan *Quick Win* pembangunan *Smart City*. Program ini memiliki dampak secara langsung kepada transaksi keuangan objek wisata Aceh Selatan yang masuk ke dalam 6 (enam) dimensi *Smart City* Aceh Selatan.

Tabel 5.4 Kegiatan Quick Win Kabupaten Aceh Selatan

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
Nama Singkat Inovasi	<i>Quick Respons Indonesia Standar (QRIS) pada Objek Wisata</i> Aceh Selatan
Penjelasan Singkat	Penggunaan QRIS sebagai transaksi non-tunai
Status Saat ini	Sudah disosialisasikan masyarakat baik pelaku wisata serta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
Manfaat dari inovasi	Layanan menjadi lebih efisien, mudah dan aman
Keunikan	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan semua dimensi <i>Smart City</i> Kabupaten Aceh Selatan - Mengintegrasikan seluruh layanan informasi yang akurat secara <i>real time</i>
Mitra	Masyarakat, Relawan, Komunitas Pelaku Wisata
Potensi untuk Pengembangan Lebih Lanjut	Integrasi semua layanan yang berhubungan dengan data dan informasi baik dari pemerintah, swasta serta melibatkan <i>stakeholder</i> lainnya dan penerapan teknologi QRIS pada hotel dan restaurant Kabupaten Aceh Selatan
Strategi Menjaga Keberlangsungan Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Dewan <i>Smart City</i> dan Tim Pelaksana 2. Melakukan <i>review</i> secara rutin membahas program dengan Dewan <i>Smart City</i> 3. Koordinasi dan menyamakan persepsi dengan <i>Stakeholder</i> 4. Pengembangan layanan dan tools berdasarkan hasil <i>review</i>

	5. Melakukan sosialisasi dan launching program kepada masyarakat
Sumber Daya yang Digunakan	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Smart City - Tim Pelaksana Smart City - Masyarakat/Relawan - <i>Admin/Operator Layanan</i> - Stakeholder
Analisis Resiko	<ul style="list-style-type: none"> - Program membutuhkan komitmen bersama antara seluruh stakeholders sehingga perlu diadakan evaluasi secara rutin untuk menyamakan persepsi - Membutuhkan tenaga operator yang banyak dan khusus menangani layanan-layanan
Indikator Keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> - Program membutuhkan komitmen bersama antara seluruh stakeholders sehingga perlu diadakan evaluasi secara rutin untuk menyamakan persepsi - Membutuhkan tenaga operator yang banyak dan khusus menangani layanan-layanan
Dimensi Smart City dan OPD	<p>Dimensi Smart City</p> <p><i>Smart Governance</i> Memberikan informasi publik secara terbuka dan transparansi</p> <p><i>Smart Branding</i> Memberikan kemudahan kebutuhan informasi investasi bagi para investor</p> <p><i>Smart Economy</i> Membangun suasana industri yang kompetitif dengan menyajikan informasi produk unggulan daerah</p> <p><i>Smart Living</i> Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat melalui pesan informasi yang aktual yang disampaikan <i>via Langsa Madani Information Board</i></p>

	<p><i>Smart Society</i> Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta peduli dengan lingkungannya masing-masing</p> <p><i>Smart Environment</i> Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk menjaga lingkungan, memahami tata kelola limbah dan energi terbarukan</p> <p>SKPD Sekretariat Daerah Diskominfo Dinas Pariwisata</p> <p>Stakeholder Pengusaha Objek Wisata Forum Kolaborasi Komunitas BUMN Media Masa</p>
Layanan yang Berkaitan	Laman web https://acehtengahkab.go.id

VI. PENUTUP

Kabupaten Aceh Selatan telah mulai melakukan usaha menuju *Smart City* yang sudah disosialisasikan oleh Kementerian Kominfo guna melakukan akselerasi pembangunan dengan menggunakan konsep *Smart City* atau Kota Pintar. Hal ini dibuktikan dengan dimasukkan istilah smart city dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan mempertimbangkan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Aceh Selatan, baik itu dari segi infrastruktur serta SDM, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan tim terkait telah mengembangkan visi, strategi dan prioritas menuju *Smart City* Aceh Selatan. Pembangunan prioritas *Smart City* Kabupaten Aceh Selatan meliputi enam dimensi, yaitu tata kelola pemerintahan (*governance*), penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah (*branding*), tata kelola perekonomian (*economy*), peningkatan kelayakan taraf hidup masyarakat (*living*), ekosistem sosial masyarakat (*social*), serta pengelolaan lingkungan (*environment*).

Program pembangunan *Smart City* Kabupaten Aceh Selatan harus tetap sejalan dengan kaidah syari'ah Islam, mengingat nilai-nilai Islam merupakan keluhuran yang dijunjung tinggi di Kabupaten Aceh Selatan sejak lama. Besar harapan, segala inovasi yang dirancang akan menjadi solusi yang signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sehingga pemerintah dapat memberikan layanan kepada publik dengan menyediakan lingkungan tempat tinggal yang berkelanjutan, layak serta meningkatkan daya saing daerah.

Dalam mewujudkannya tujuan dari *Smart City* Kabupaten Aceh Selatan, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama antar sektor, baik itu dari pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta. Diperlukan penyesuaian persepsi dan sinkronisasi untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dengan demikian pengembangan *Smart City* bisa menjadi efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif. Berbagai akselerasi pembangunan merupakan komitmen bersama seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan visi misi *Smart City* Aceh Selatan.

Proses pengembangan menuju *Smart City* masih sangat panjang. Kepala daerah, Dewan *Smart City* dan tim teknis berkomitmen untuk mewujudkan rencana induk *Smart City* dalam implementasi, maupun monitoring dan evaluasi sehingga akan berjalan dengan sistematis dan berkelanjutan. Pembangunan *Smart City* merupakan usaha yang kontinu dan bertahap, maka dalam pengembangannya akan secara dinamis disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi setiap tahun terhadap rancangan yang telah dibuat dan perubahan tersebut akan dikuatkan dengan Peraturan Bupati.